

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 060/047/SE/2023 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani transportasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2024 yaitu Untuk dijadikan dokumen perencanaan yang memuat arah

kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

Sedangkan Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 2024 yaitu Sebagai dasar monitoring evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pembangunan Bidang Perhubungan di Provinsi Sumatera Selatan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;

- b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- e. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Sekretaris

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan, informasi dan teknologi, urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan Dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;

- c. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- g. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengembangan informasi dan teknologi Perhubungan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Rincian tugas sub bagian Umum dan Kepegawaian :

- a. Melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, kearsipan, kehumasan, administrasi kepegawaian, kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan proses penerimaan, pengelolaan, distribusi, penggandaan, pengiriman dan pengarsipan surat-surat masuk maupun keluar;
- c. Mengurus rumah tangga Dinas yang meliputi keamanan, kebersihan, penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- d. Melaksanakan sirkulasi perlengkapan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- e. Menginventarisasi barang inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- f. Melaksanakan kegiatan kehumasan, bantuan hukum dan keprotokolan;
- g. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan Dinas dan hubungan masyarakat;

- h. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, SKP, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai;
- l. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan izin/tugas belajar;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan di lingkungan Dinas, dan rancangan serta pendokumentasian peraturan perundang-undangan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbagian Keuangan;

Rincian tugas sub bagian keuangan :

- a. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan Dinas dan administrasi keuangan;
- b. Menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran;
- c. Melaksanakan tata usaha keuangan, meliputi pembukuan, penyusunan, pertanggungjawaban dan pengamanan dokumen keuangan;

- d. Menyiapkan bahan dan penyusunan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyelesaian proses tuntutan ganti rugi/tuntutan bendahara;
- e. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran;
- f. Melaksanakan pembendaharaan keuangan Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan Anggaran Pendapatan/ Penerimaan;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian Keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Rindian tugas sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan:

- a. Membuat rencana, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- b. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan program kerja tahunan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- c. Mengkoordinasikan usulan program tahunan Perhubungan, dengan instansi lain;
- d. Menyiapkan usulan penetapan Kepala Satker Pembangunan dan pimpinan pelaksana kegiatan di bidang Perhubungan;
- e. Mengevaluasi dan mengkoordinasikan usulan program pembangunan Perhubungan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis Vertikal maupun Badan Usaha Milik Negara di lingkungan perhubungan di daerah sebelum ditampung dalam program Pemerintah Provinsi dan atau diusulkan ke Pemerintah Pusat;

- f. Menyusun dan mengkoordinasikan rencana pembangunan bidang Perhubungan jangka menengah dan panjang;
- g. Membuat rencana pengembangan jaringan dan pelayanan jasa Perhubungan;
- h. Membuat dokumen-dokumen bidang Perhubungan berupa kinerja sarana dan prasarana Perhubungan, tatanan transportasi wilayah, RENSTRA dan dokumen lainnya;
- i. Menyusun dan merencanakan pengembangan informasi teknologi bidang Perhubungan;
- j. Menyiapkan usulan teknis pembangunan dan pengembangan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi;
- k. Mengkoordinasikan dan menyelesaikan temuan dan tindak lanjut laporan hasil temuan pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Perhubungan, baik oleh auditor pemerintah maupun masyarakat;
- l. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan;
- m. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja operasional bidang Perhubungan;
- n. Menyusun program laporan Dinas baik laporan penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan berupa laporan bulanan, laporan triwulan, laporan tahunan, laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan laporan Dinas lainnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;
- c. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas jalan dan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;

Rincian tugas seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan:

- a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
- b. Melaksanakan Sistem pengendalian persimpangan terkoordinasi/Area Traffic Control System (ATCS);
- c. Pengumpulan dan Pengolahan Data lalu lintas harian rata-rata (LHR) di jalan Provinsi;
- d. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas di jalan provinsi;

- e. Mengidentifikasi, analisis dan penetapan penanganan kemacetan lalu lintas pada jalan provinsi;
- f. Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- g. Membuat usulan penentuan lokasi rest area di jalan provinsi;
- h. Memberikan bimbingan pelaksanaan Wahana Tata Nugraha di tingkat provinsi dan nasional;
- i. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
- k. Membangun Prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pengendalian Operasional Lalu lintas Jalan;

Rincian tugas seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan:

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang Pengendalian Operasional LLAJ;
- b. Mengawasi dan mengendalikan perizinan, kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan serta melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan penertiban kendaraan bermotor di jalan provinsi dan nasional;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- d. Menetapkan besaran tarif parkir dan menentukan personil juru parkir di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;
- e. Melakukan pengawasan dan penertiban parkir khusus di lokasi asset pemerintah provinsi, ruas jalan provinsi dan nasional;

- f. Melaksanakan pertolongan kecelakaan dengan menggunakan mobil unit penolong (derek);
- g. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi;
- h. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan pengendalian operasional angkutan jalan;
- i. Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;
- j. Melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan;
- k. Mengoperasikan alat penimbangan kendaraan bermotor di jalan (portable);
- l. Memberikan perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi;
- m. Melaksanakan penyidikan pelanggaran :
 - n. Peraturan dan perundangan di bidang LLAJ;
 - o. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
 - p. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala;
 - q. Perizinan angkutan umum.
- r. Membantu pengaturan lalu lintas di ruas jalan provinsi dan jalan nasional;
- s. Melaksanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan angkutan/rangkaian VVIP; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Rincian tugas seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan:

- a. Memberikan pedoman pengumpulan, pengelolaan dan analisa kecelakaan lalu lintas di Kabupaten/Kota;
- b. Memberikan bimbingan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan;

- c. Memberikan pedoman kecepatan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas di ruas jalan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
- d. Mengaudit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di ruas jalan provinsi;
- e. Mengumpulkan, pengolahan data dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi;
- f. Menyelenggarakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi dan jalan nasional;
- g. Memberikan bimbingan pelaksanaan pelajar pelopor di tingkat provinsi dan nasional;
- h. Meneliti dan menganalisa daerah rawan kecelakaan, rawan kemacetan, rawan longsor dan rawan banjir di jalan provinsi dan nasional;
- i. Melakukan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas yang berwawasan lingkungan;
- j. Memberikan bimbingan penanganan dampak lingkungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan;
- k. Melaksanakan dan memberikan persetujuan analisis dampak lalu lintas di jalan provinsi dan pelaksanaan rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.4 Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana Terminal, Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan dan pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi

manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;

- b. Penyusunan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pemaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana terminal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Angkutan Jalan

Rincian tugas seksi Angkutan Jalan:

- a. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program angkutan jalan di jalan provinsi dan jalan nasional;
- b. Memberikan rekomendasi izin dispensasi kelas jalan dan izin insidentil angkutan umum;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap awak kendaraan angkutan umum;
- d. Memberikan izin trayek angkutan pedesaan yang melintas batas provinsi dan izin angkutan khusus;
- e. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan angkutan jalan;
- f. Memberikan izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah;
- g. Memberikan rekomendasi untuk penerbitan STNK berdasarkan persyaratan teknis kendaraan bermotor dan peruntukannya;

- h. Menyusun penetapan jaringan jalan untuk AKDP dan angkutan peti kemas, membuat usulan penetapan MST kurang dari yang telah ditetapkan dalam kelas jalan serta membuat usulan dan penetapan jaringan lintas;
- i. Membuat rekomendasi untuk penerbitan izin trayek AKAP, izin angkutan barang berbahaya dan surat keterangan jalan;
- j. Menyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- k. Menyusun dan menetapkan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;
- l. Memberikan izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi;
- m. Menyusun dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi;
- n. Memberikan izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- o. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- p. Memberikan izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- q. Memberikan izin operasi angkutan sewa dan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi;
- r. Memberikan rekomendasi izin operasi angkutan pariwisata;
- s. Menetapkan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- t. Menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Rincian tugas seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan:

Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan pemedu moda;

- a. Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) transportasi perhubungan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
- b. Merencanakan jaringan trayek, perizinan dan tarif angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Memfasilitasi angkutan perintis dalam provinsi, fasilitas perizinan angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Mengelola data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- e. Mengusulkan dan evaluasi program Fasilitas Bandar Udara dan susunan keanggotaan Komite Fasilitas Bandar Udara (KOMFAL) di wilayahnya yang tidak terdapat kantor Otoritas Bandar Udara;
- f. Mengendalikan dan operasional heliport dalam wilayah Sumatera Selatan;
- g. Menyelenggarakan Administrasi data heliport/heliapad di Sumatera Selatan;
- h. Memantau penyelenggaraan angkutan udara haji di wilayah provinsi;
- i. Memberikan pertimbangan teknis dalam rangka pembangunan heliport; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Terminal

Rincian tugas seksi Terminal adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
- b. Menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
- c. Menyiapkan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana terminal tipe B;
- d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana terminal tipe B;
- e. Mengumpulkan dan pengolahan data, penyusunan rencana, program dan evaluasi pembangunan sektor perhubungan di bidang angkutan jalan di jalan provinsi;
- f. Melaksanakan perhitungan lalu lintas harian rata-rata (LHR) dan melakukan perhitungan lalu lintas penumpang angkutan umum dan barang;
- g. Memberikan rekomendasi dan izin pengesahan rancang bangun, penetapan titik lokasi serta persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B;
- h. Menyelenggarakan pembangunan terminal penumpang tipe B provinsi;
- i. Menentukan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi Kabupaten/Kota;
- k. Menyusun dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi;

- l. Melakukan analisa dan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan provinsi;
- m. Membuat usulan penentuan lokasi rest area di jalan provinsi;
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.5 Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Bidang Pelayaran;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayaran membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Kepelabuhanan

Rincian tugas seksi Kepelabuhanan :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, penerbitan izin pembangunan, pengoperasian dan pengoperasian 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- b. Penyiapan bahan pemberian perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- c. Penyiapan bahan pemberian perizinan pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- d. Penyiapan bahan pemberian perizinan pekerjaan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional serta alur pelayaran kelas II;
- e. Penyiapan bahan pemberian izin usaha badan usaha pelabuhan (BUP) di pelabuhan pengumpan regional;
- f. Penyiapan bahan pemberian perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DUKr/DUKp pelabuhan pengumpan regional;
- g. Menghimpun dan mengelola data kapal – kapal pedalaman berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300 serta data sarana prasarana Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut;
- h. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana;
- i. Menetapkan titik lokasi pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu-rambu ASDP pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi);
- j. Pemberian rekomendasi ketinggian pembangunan jembatan dan pembangunan lainnya selain untuk kepentingan pelayanan di alur pelayaran Kelas II;
- k. Penyiapan pemberian rekomendasi penetapan lokasi Terminal Khusus (Tensus);

- l. Pemetaan alur sungai lintas Kabupaten/Kota dalam provinsi dan pada alur pelayaran kelas II untuk kebutuhan transportasi;
- m. Penyiapan pemberian rekomendasi pembangunan prasarana yang melintasi dan berada di alur pelayaran kelas II; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran

Rincian tugas seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan laut bagi usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah provinsi;
- b. Penyiapan bahan pemberian perizinan usaha jasa terkait bongkar-muat, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- c. Pendaftaran pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam provinsi;
- d. Pelaporan dan pendataan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (trampet) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- e. Memberikan persetujuan kegiatan Ship to Ship (STS) antar kabupaten/kota serta wilayah provinsi;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Rincian tugas seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat bagi orang - perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional;
- b. Menyiapkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dan daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi;
- c. Menyiapkan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah kabupaten/kota dalam daerah provinsi;
- d. Menyiapkan penetapan pedoman tarif angkutan Sungai dan Danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam Provinsi;
- e. Melaporkan dan pendataan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat pelabuhan antar provinsi dan internasional;
- f. Menyiapkan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
- g. Mendaftarkan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi , lintas

- pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
- h. Menerbitkan pas perairan daratan serta pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
- i. Menerbitkan dokumen pengawakan kapal sungai dan danau;
- j. Melaksanakan penerbitan Surat Ukur, Sertifikat dan Trayek bagi kapal pedalaman yang berukuran isi kotor GT 7 s.d GT 300;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.6 Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Rincian tugas seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- c. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian;
- d. Mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- e. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum, yang jaringan jalurnya melintasi batas daerah kabupaten/kota;
- f. Menerbitkan izin operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Mengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas dan menyiapkan pelaporan pelaksanaan perkeretaapian di provinsi;
- i. Mengusahakan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
- j. Melaksanakan pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan kereta api milik pemerintah provinsi Sumatera Selatan;
- k. Menagihkan dan penyetoran uang retribusi pemakaian kekayaan daerah;

- l. Menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana perkeretaapian;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian

Rincian tugas seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan di bidang lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian;
- b. Melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- c. Menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- d. Menetapkan jaringan pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan dalam perkeretaapian provinsi;
- e. Menetapkan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta provinsi;
- f. Merencanakan, penetapan, pemantauan dan evaluasi Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) Provinsi;
- g. Menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- h. Menerbitkan Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
- i. Menetapkan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan

wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- j. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- k. Menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- l. Menyiapkan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang Perkeretaapian Provinsi;
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Lingkungan Perhubungan

Rincian tugas seksi Lingkungan Perhubungan :

- a. Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor Perhubungan di bidang keselamatan perkeretaapian;
- b. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;
- c. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Keselamatan Perkeretaapian;
- d. Melaksanakan penelitian terhadap setiap kecelakaan kereta api bersama unsur-unsur terkait, serta menangani permasalahan lalu lintas angkutan jalan dan kereta api;
- e. Menyiapkan perumusan, penyelenggaraan dan pencegahan penanganan keselamatan di pintu perlintasan kereta api;

- f. Melakukan pelaksanaan dan pengendalian operasional stasiun kereta api Inderalaya;
- g. Memberikan bimbingan teknis, supervisi pedoman penyelenggaraan pendidikan dan latihan keselamatan perkeretaapian;
- h. Melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan pengangkutan barang berbahaya dan beracun;
- i. Melaksanakan kegiatan rekayasa, penanganan keselamatan perkeretaapian, serta evaluasi perkembangan peningkatan teknologi keselamatan perkeretaapian provinsi;
- j. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- k. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- l. Menyiapkan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- m. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keselamatan perkeretaapian;
- n. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi inspeksi keselamatan dan penilaian keselamatan, pelaksanaan inspeksi dan penilaian keselamatan, identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam;
- o. Melaksanakan identifikasi penyebab kecelakaan dengan berdasarkan data faktual dan kecelakaan, tindakan korektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama;
- p. Menyusun Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perkeretaapian Provinsi;
- q. Menyiapkan penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;

- r. Menyiapkan penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpuan regional;
- s. Menyiapkan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan, DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul dan utama;
- t. Menyiapkan pemberian persetujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpuan regional;
- u. Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan stasiun kereta api milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- v. Mengelola data dan informasi, rekayasa, program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan keselamatan perkeretaapian Provinsi;
- w. Menutup perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.7 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut

Susunan Organisasi UPTD Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Laut terdiri dari :

1. Kepala UPTD

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Penimbangan ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPTD Penimbangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan , Pengoperasian, pengendalian, Pengawasan, pemeriksaan dan Evaluasi angkutan sungai, danau, Penyeberangan dan laut;

- b. Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pelabuhan Sungai, danau, penyeberangan , pelabuhan laut wilayah dan Terminal khusus;
- c. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, pengoperasian, Pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, Danau, penyeberangan dan laut;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan , evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau, Penyeberangan dan laut;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana, prigram kegiatan , anggaran, Evaluasi , pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan Angkutan sungai , danau penyeberangan dan laut;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi angkutan Sungai, danau , penyeberangan dan laut serta pungutan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait penyelenggaraan , pengendalian , pengawasan dan pemeriksaan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, humas dan kerjasama pada UPTD Penyelenggaraan angkutan sungai, danau penyeberanga dan laut;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan penumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggraan angkuttan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- c. penyusunan rencana, program kegiatan , anggaran, evaluasi, angkutan sungai, danau , penyeberangan dan laut;

- d. Pelaksanaan perencanaan , pengusulan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terkait penyelenggaraan angkutan sungai, danau , penyeberangan dan laut;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen penting lainnya;
- f. pelaksanaan perencanaan penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, sarana prasarana dan fasilitas kantor UPTD penyelenggaraan angkutan sungai, danau , penyeberangan dan laut;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan teknis operasional, pengawasan dan penertiban lalu lintas angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- c. Pelaksanaan pemberian rekomendasi pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya di sungai lintas kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi jasa tambat, jasa labuh dan atau jasa-jasa lainnya dilingkungan pelabuhan atau dermaga yang dikelola pemerintah provinsi dan di alur pelayaran kelas II;
- e. Pelaksanaan perencanaan, pengaturan dan pengoperasian kapal-kapal patroli dan bus air yang menjadi kewenangannya;
- f. Pengawasan dan penertiban terminal khusus/ seterus yang berada di sungai dan danau dalam wilayah provinsi;

- g. Pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai pada jaringan trayek lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- h. Pengawasan dan penertiban angkutan barang khusus dan bahan berbahaya melalui sungai dan danau dalam wilayah provinsi;
- i. Pengawasan pelaksanaan pedoman tarif angkutan sungai lintas kabupaten/ kota dalam wilayah provinsi;
- j. Pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan sungai,danau, penyeberangan dan laut dalam wilayah provinsi
- k. Pengawasan dan penertiban kapal-kapal angkutan sungai lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- l. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran,bencana ataupun musibah/kecelakaan dipelairan pedalaman serta alur pelayaran laut 12 mil;
- m. Pengumpulan data dan informasi serta pelaporan musibah/kecelakaan dipelairan pedalaman serta alur pelayaran laut 12 mil;
- n. Pengawasan penyelenggaraan pelabuhan laut regional dan pelabuhan sungai dan danau lintas kabupaten/ kota dalam provinsi;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional UPTD penyelenggaraan angkutan sungai, danau, penyeberangan dan laut;
- b. Pelaksanaan pengawasan,pemeriksaan dan pengujian sarana prasarana di UPTD penyelenggaraan angkutan sungai,danau, penyeberangan dan laut;

- c. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana prasarana di UPTD penyelenggaraan angkutan sungai,danau, penyeberangan dan laut;
- d. Pelaksanaan perencanaan pemeliharaan rutin/ berkala dan perbaikan kapal-kapal patroli serta bus air yang menjadi kewenangannya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait sarana dan prasarana pada alur pelayaran kelas II dalam wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi serta pelaporan terkait sarana prasarana dan fasilitas keselamatan angkutan sungai;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.8 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya

Susunan Organisasi UPTD Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya terdiri dari :

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan tanjung api-api dan kereta api indralaya.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan, pengoperasian dan pengendalian pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan kereta Api Indralaya;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan kereta Api Indralaya;
- c. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional dan pelayanan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-Api dan Kereta Api Indralaya;
- d. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan

pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Stasiun Indralaya;

- e. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi pelayanan jasa dan pungutan lain yang sah sesuai dengan ketentuan pengaturan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan kereta Api Indralaya;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelabuhan di pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, humas dan kerjasama di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api Indralaya;
- b. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) terkait penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- e. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, sarana prasarana dan fasilitas kantor pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;

- f. Pengelolaan dan pemeliharaan barang milik daerah di pelabuhan Tanjung Api-api dan kereta Api Indralaya;
- g. Penyelenggara dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen penting lainnya;
- h. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api dan Kereta Api Indralaya;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Operasional Penyeberangan Tanjung Api-api

Seksi Operasional Penyeberangan Tanjung Api-api mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- b. Pelaksanaan tugas operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- c. Pengaturan jadwal operasional jadwal operasional pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- d. Penyusunan dan pengaturan jadwal tugas dan petugas operasional Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api;
- e. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi jasa Kepelabuhanan dan pungutan lain yang sah sesuai dengan Ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan pengawasan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan penumpang kapal di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- g. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan musibah kecelakaan kapal di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;

- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan pelabuhan di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pelayanan pelabuhan di pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api;
- k. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penumpang kapal di pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Operasional KA Indralaya

Seksi Operasional KA Indralaya mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan, operasional kereta Api Indralaya;
- b. Pelaksanaan tugas operasional dan pelayanan kereta Api Indralaya;
- c. Pengaturan jadwal operasional Kereta Api Indralaya dan jadwal petugas;
- d. Pelaksanaan dan pengawasan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan penumpang Kereta Api Indralaya;
- e. Pelaksanaan penanggulangan bencana dan musibah kecelakaan Kereta Api Indralaya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait operasional dan pelayanan Kereta Api Indralaya;
- g. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian sarana dan prasarana Kereta Api Indralaya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan pelayanan Kereta Api Indralaya;
- i. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penumpang Kereta Api Indralaya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.9 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Terminal

Susunan Organisasi UPTD Terminal terdiri dari :

1. Kepala UPTD

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan penyelenggaraan Terminal.

Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan, pengoperasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi Terminal;
- b. Pelaksanaan kebijakan terkait pengoperasian Terminal;
- c. Pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan dan pengoperasian Terminal;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan terkait pengoperasian Terminal;
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan terkait pengoperasian Terminal;
- f. Pelaksanaan dan pengawasan pemungutan retribusi Terminal serta pungutan lain yang sah sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait pengoperasian Terminal;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, humas dan kerjasama di UPTD Terminal;
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi dan laporan terkait pengoperasian Terminal;
- c. Penyusunan rencana, program kegiatan, anggaran, evaluasi dan pengolahan data dan pelaporan terkait pengoperasian Terminal;

- d. Pelaksanaan perencanaan, pengusulan kebutuhan dan pengelolaan serta penjadwalan sumber daya manusia (SDM) terkait pengoperasian Terminal;
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan kearsipan dan penatausahaan surat menyurat serta dokumen penting lainnya;
- f. Pelaksanaan penyediaan peralatan, perlengkapan dan fasilitas kantor UPTD Terminal;
- g. Pelaksanaan pembuatan laporan harian, mingguan dan bulanan Terminal;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Operasional

Seksi Operasional mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kebijakan terkait pengoperasian Terminal;
- b. Pelaksanaan Penyelenggaraan teknis operasional, pengawasan tugas pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja daerah dan daerah pengawasan terminal;
- c. Pelaksanaan pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum;
- d. Pelaksanaan pengaturan parkir kendaraan di lingkungan kerja Terminal;
- e. Pelaksanaan pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat, pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan, serta pencatatan faktor muat kendaraan (Load Faktor);
- f. Pelaksanaan pengawasan ketertiban dan keamanan di dalam terminal;
- g. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, pemeriksaan fisik kendaraan dan pemeriksaan awak kendaraan penumpang umum;
- h. Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Sarana dan Prasarana

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional Terminal;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan sarana prasarana di Terminal;
- c. Pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala dan perbaikan sarana dan prasarana di Terminal;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain terkait sarana dan prasarana di Terminal;
- e. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, evaluasi serta pelaporan terkait sarana dan prasarana di terminal;
- f. Pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan dan keutuhan serta penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- g. Pelaksanaan penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2.10 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Untuk menjalankan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan seperti tersebut diatas, maka sumber daya yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi :

1.2.10.1 Sumber Daya Manusia dan Kompetensi

Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan memiliki jumlah pegawai sebanyak 136 pegawai yang tersebar pada Sekretariat, 4 Bidang dan 3 UPTD dengan komposisi sebagai berikut:

1. Bidang Sekretariat

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Sekretariat

NO	JUNJAH PEGAWAI (31 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki-laki	Perempuan			
1.	18 orang	13 Orang	S3	-	Diklat Angah dan ABK
			S2	8 orang	Diklat AKPK
			S1	9 orang	Diklat Keuangan
			D4	-	Diklat Perencanaan
			D3	3 orang	
			D2	-	
			SMA	4 orang	
			SMP	1 orang	
			SD	1 orang	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Sekretariat sebagai berikut :

Tabel 1.2 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

NO.	ANALISA JABATAN	JUNJAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
1.	Analisa Manajemen Risiko	1	0	1
2.	Analisa Pelaksanaan Proyek Pemerintahan	1	0	1
3.	Analisa Pembangunan	1	0	1
4.	Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	2	2	0
5.	Analisa Rencana Program dan Kegiatan	1	0	1
6.	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	1
7.	Pengelola Program Kegiatan	1	0	1
8.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1	0	1
9.	Pengelola Laku Limas Darat	2	2	0
10.	Pranata Komputer Ahli Muda	1	1	0
Jumlah		12	3	9

Tabel 1.3 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Subbag Umum dan Kepegawaian

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
1.	Analisa Sumber Daya Manusia Aparatur	3	0	2
2.	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	2	1	1
3.	Pengelola Barisan dan Pemukiman Rumah Tangga	4	0	2
4.	Pengelola Kepegawaian	2	0	2
5.	Pengelola Barang Milik Negara	1	0	2
6.	Pengadministrasian Kepegawaian	2	2	2
7.	Pengelola Surat	2	0	2
8.	Pengadministrasian Umum	2	1	1
9.	Petugas Keamanan	4	1	1
10.	Asisten Pelaksana Terampil	6	3	0
Jumlah		30	13	15

Tabel 1.4 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Subbag Keuangan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
1.	Bendahara	2	2	0
2.	Penata Keuangan	2	1	1
3.	Penata Laporan Keuangan	2	2	0
4.	Pengadministrasian Keuangan	1	0	1
5.	Pengelola Keuangan	1	1	0
6.	Pengelola Perjalanan Dinas	1	1	0
7.	Verifikator Data Laporan Keuangan	1	0	1
8.	Pengurus Lalu Lintas Dana	1	1	0
Jumlah		11	8	3

2. Bidang Lalu Lintas Jalan

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Bidang Lalu Lintas

NO	JUMLAH PEGAWAI (26 orang)		JERJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki-laki	Perempuan			
1	17 Orang	9 Orang	S3	-	Diklat PPHS
			S2	5 orang	Diklat Orientasi LLAJ
			S1	20 orang	Diklat JT
			D4	-	Diklat ANDA LAIN
			D3	1 Orang	Diklat KA
			D2	-	
			SMA		
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Lalu Lintas Jalan sebagai berikut :

Tabel 1.6 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

NO	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekstisting	Eksistensi
1.	Pengawas Lalu Lintas Darat	4	3	1
2.	Pengelola Sistem Informasi Rencana dan Prioritas Jalan	1	0	1
3.	Penyusun Rekayasa Lalu Lintas	1	0	1
4.	Operator Console	1	0	1
5.	Pengadministrasi Uraian	3	0	3
Jumlah		10	3	7

Tabel 1.7 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas

NO	ANALISA JADATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Kesediaan	Kekurangan
1.	Pengawas Lalu Lintas Darat	13	13	0
2.	Pengelola Pengawas Lalu Lintas Angkutan Jalan	1	1	0
Jumlah		15	16	0

Tabel 1.8 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Keselamatan Lalu Lintas

NO.	ANALISA JADATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Kesediaan	Kekurangan
1.	Pengawasan Keselamatan Darat / Jalan	1	0	1
2.	Pengawas Lalu Lintas Darat	3	2	0
3.	Pemeriksa Keselamatan Darat	1	0	1
4.	Pracetra Standar Keselamatan	1	0	1
Jumlah		5	2	3

3. Bidang Angkutan Jalan

Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Bidang Angkutan Jalan

NO	JUMLAH PEGAWAI (7 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)	KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
1.	5 orang	2 Orang	S3	-
			S2	3 orang
			S1	4 orang
			D4	-
			D3	-
			D2	-
			SMA	-
			SMP	-
			SD	-

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut :

Tabel 1.10 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Angkutan Orang

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Analisa Angkutan Darat	1	1	0
2.	Pengawas Lalu Lintas Darat	1	1	0
Jumlah		2	2	0

Tabel 1.11 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Angkutan Barang

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Analisa Angkutan Darat	1	1	0
2.	Pengelola Pertaman Angkutan Jalan	3	0	3
3.	Pengadministrasian Umum	2	0	2
Jumlah		6	1	5

Tabel 1.12 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Analisa Sistem Pemadu Moda Transportasi Perkotaan	1	1	0
2.	Pengelola Data Jaringan dan Transportasi Jalan	1	1	0
Jumlah		2	2	0

4. Bidang Pelayaran

Tabel 1.13 Jumlah Pegawai Bidang Pelayaran

NO	JUNJAH PEGAWAI (10 orang)		JERJANO PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	4 Orang	6 orang	S3	-	Diklat PMS
			S2	3 orang	Diklat HELO
			S1	4 orang	
			D4	-	
			D3	1 Orang	
			D2	-	
			SMA		
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Pelayaran sebagai berikut :

Tabel 1.14 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Keperabahan

NO.	ANALISA JADWATAN	JUNJAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pengadministrasikan Surat Pelayaran	2	0	2
2.	Pengawas Pelabuhan	2	2	0
Jumlah		4	2	2

Tabel 1.15 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran

NO.	ANALISA JADWATAN	JUNJAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Analisa Angkutan Laut	1	0	1
2.	Analisa Pelayaran	2	1	1
3.	Analisa Perizinan Transportasi Usaha Angkutan	1	0	1
4.	Pengawas Lalu Lintas Dan	1	1	0
Jumlah		5	2	3

Tabel 1.16 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pengawas Lalu Lintas Darat	2	2	0
2.	Pengawas Keselamatan Angkutan Sungai	2	1	1
3.	Pengelola Sertifikasi Angkutan Sungai	1	1	0
Jumlah		5	4	1

5. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Tabel 1.17 Jumlah Pegawai Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

NO	JUMLAH PEGAWAI (6 orang)		JENJANG PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)	
	Laki - laki	Perempuan				
1.	5 orang	3 Orang	S3	-	Diklat LAJIN	ANDA
			S2	2 orang	Diklat Keselamatan	Audit
			S1	6 orang	Diklat	
			D4	-		
			D3	-		
			D2	-		
			SM A	-		
			SM P	-		
			SD	-		

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan sebagai berikut:

Tabel 1.18 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pegawasa Perkeretaapian	1	1	0
2.	Pengadministrasi Cakupan	2	0	2
Jumlah		3	1	2

Tabel 1.19 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pengawas Lalu Lintas Darat	1	1	0
2.	Pemeriksa Perkeretaapian	2	0	2
3.	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Perkeretaapian	2	0	2
Jumlah		5	1	4

Tabel 1.20 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Lingkungan Perhubungan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pengawas Lalu Lintas Darat	1	1	0
2.	Pengawas Muatan Barang Berbahaya dan Barang Khusus	1	1	0
3.	Pengelola Audit Keselamatan Perkeretaapian	1	0	1
4.	Pengelola Bangunan dan Jalur Perkeretaapian	2	0	2
5.	Pengelola Jaringan Antar Moda Transportasi	2	0	2
Jumlah		7	2	5

6. UPTD PASDPL

Tabel 1.21 Jumlah Pegawai UPTD Penyelenggaraan ASDP
dan Laut

NO	JUMLAH PEKAWAI (15 orang)		JUMLAH PENDUKUKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	12 orang	3 Orang	S3	-	Diklat Orientasi ILASDP
			S2	6 orang	Diklat SAR
			S1	7 orang	Diklat MOP
			D4	-	Diklat

NO	Jumlah Pegawai (15 orang)		Jenjang Pendidikan (orang)	Kompetensi (orang)
	Laki - laki	Perempuan		
			D3	2 Orang
			D2	-
			SMA	-
			SD	-
			SD	-

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD PASDPL sebagai berikut :

Tabel 1.22 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Subbag Tata Usaha

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Existing	Kekurangan
1.	Penata Keuangan	2	1	1
2.	Pengadministrasian Umum	2	1	1
3.	Pengelola Surat	2	1	1
Jumlah		6	3	3

Tabel 1.23 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Operasional

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Existing	Kekurangan
1.	Pengawas Pelabuhan	2	2	0
2.	Pengawas Lintas Laut	2	2	0
Jumlah		4	4	0

Tabel 1.24 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Sarana dan Prasarana

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Existing	Kekurangan
1.	Pengawas Lintas Darat	4	4	0
Jumlah		4	4	0

7. UPTD Pengelolaan Terminal

Tabel 1.25 Jumlah Pegawai UPTD Pengelolaan Terminal

NO	Jumlah Pegawai (26 Orang)		Jumlah Pendidikan (orang)		Kompetensi (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1	23 Orang	3 Orang	S3	-	Didat Pengujian
			S2	4 orang	Didat Pengelolaan Terminal
			S1	12 orang	
			D4	-	
			D3	-	
			D2	-	
			SMA	10 orang	
			SMP	-	
			SD	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pengelolaan Terminal sebagai berikut:

Tabel 1.26 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Subbag Tata Usaha

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Existeng	Kekurangan
1.	Penata Keuangan	2	0	2
2.	Pengadministrasian Umum	2	2	0
3.	Pengelola Surat	1	1	0
Jumlah		4	3	2

Tabel 1.27 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia Seksi Operasional

NO	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Existeng	Kekurangan
1.	Operator Terminal	14	10	4
2.	Pengelola Angkutan Kendaraan	2	2	0
3.	Pengadministrasian Karcis	7	0	7
4.	Pemeriksaan Terminal	7	5	2
Jumlah		30	17	13

Tabel 1.28 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Sarana dan Prasarana

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pengelola Terminal	7	0	7
Jumlah		7	0	7

8. UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

Tabel 1.29 Jumlah Pegawai UPTD Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya

NO	JUMLAH PEGAWAI (13 orang)		JUMLAH PENDIDIKAN (orang)		KOMPETENSI (orang)
	Laki - laki	Perempuan			
1.	12 Orang	1 Orang	83	-	Diklat Perencanaan
			82	3 orang	Diklat Pengawasan Pelabuhan
			81	9 orang	
			84	-	
			83	-	
			82	-	
			85A	1 orang	
			85B		
			80	-	

Analisa kebutuhan kompetensi Sumber Daya Manusia Perhubungan Pada UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Stasiun Kereta Api Inderalaya sebagai berikut:

Tabel 1.30 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Subbag Tata Usaha

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Penata Keuangan	2	1	1
2.	Pengadministrasian Umum	2	1	1
3.	Pengelola Surat	2	1	1
Jumlah		6	3	3

Tabel 1.31 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Operasional Pelabuhan

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pengawas Pergerakan Kapal	6	5	1
Jumlah		6	5	1

Tabel 1.32 Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia
Seksi Operasional Kereta Api Indralaya

NO.	ANALISA JABATAN	JUMLAH		
		Kebutuhan	Ekisting	Kekurangan
1.	Pengawas Lintas Laut	4	4	0
Jumlah		4	4	0

1.2.10.2 Inventaris Tanah Dan Bangunan

Tabel 1.33 Daftar Inventaris Tanah dan Bangunan
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

NO	Nama Barang	Alamat Lokasi/Lokasi Alamat	Keterangan
1	Kantor Dinas Perhubungan	Jl. Kpt. A. Rivai No. 51 Palembang	Tanah dan 2 (dua) buah Bangunan Gedung 2 di Kantor Dinas Perhubungan
2	Rumah Dinas Taksi Betutu	Jl. Cempaka Krt. Taksi Betutu Palembang	Tanah dan Rumah Dinas No. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23, dan Rumah Bawah Dusun/Induk
3	Rumah Dinas Pendawa	Jl. pendawa kel 2 air Palembang	Tanah dan 11 (sebelas) Bangunan Rumah Dinas
4	Pelabuhan Perseberangan Tanjung Api - Api	Desa Bungang 1 kec. Banyuwasin II Kab. Banyuwasin	Tanah dan Gedung Kantor, Dermaga, Kantin, Fasilitas perbaikan Busan Belal Pelabuhan Perseberangan TAA
5	Stasiun Kereta Api UNSS Indralaya	Jl. Palembang - Indralaya	Bangunan Gedung Stasiun dan Gedung Kantor

NO	Nama Barang	Alamat Letak/Lokasi Alamat	Keterangan
6	Bangunan Gedung Terminal Type B Jakabaring	Jl. Pangeran Katu Jakabaring Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Jakabaring
7	Bangunan Gedung Terminal Type B Indralaya	Jl. Lintas Sumatera Indralaya KM 33	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Indralaya
8	Bangunan Gedung Terminal Type B Randik Muli Banyuwatin	Jl. Terminal Randik kah. Muba	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD serta Mushola Terminal Type B Randik Muba
9	Bangunan Gedung Terminal Type B Muaraduo OKUS	Muaraduo Lhwa Kab. Oku Selatan	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD, kios Terminal Type B Muaraduo
10	Bangunan Gedung Terminal Type B Martapura	Jl. lintas Sumatera km. 7 Kotabaru Selatan Martapura 32182	Tanah dan Bangunan Gedung 2 lt. UPTD Terminal Type B Martapura
11	Bangunan Gedung Terminal Type B Lubuk Harjo	Desa Lubuk Harjo Belitang Madang Raya	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD dan kantin Terminal Type B Lubuk Harjo
12	Bangunan Gedung Terminal Type B Petanang	Jl. A. Yani Petanang Kota Lubuk Linggau	Tanah dan Bangunan Gedung UPTD Terminal Type B Petanang

Sumber : Dinas Perhubungan, 2024

1.3 ISU STRATEGIS

1.3.1 Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas selalu menjadi isu utama dalam penyediaan layanan transportasi. Tingginya jumlah penduduk, tingginya kepemilikan kendaraan pribadi serta meningkatnya mobilitas masyarakat menjadi beberapa factor utama yang membuat angka kecelakaan lalu lintas terus naik dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023 Jumlah Kecelakaan di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2.337 kejadian dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi 2.577 kejadian. Atau naik sebesar 10,27%. Peningkatan angka kecelakaan lalu lintas

ini tentunya perlu mendapatkan perhatian khusus tidak hanya oleh pemerintah, namun juga seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat pengguna jalan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana keselamatan lalu lintas
- b. Peningkatan Pelayanan angkutan umum
- c. Penguatan sosialisasi dan kampanye keselamatan kepada masyarakat
- d. Koordinasi dan kolaborasi program antar berbagai pemangku kepentingan
- e. Pemanfaat teknologi informasi dalam pengendalian dan manajemen rekayasa lalu lintas

1.3.2 Peningkatan Jaringan Pelayanan Transportasi

Transportasi memiliki dua fungsi utama, yaitu Membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Dukungan transportasi yang baik membuat kehidupan bernegara menjadi lebih optimal karena seluruh kebutuhan dapat terpenuhi. Manusia bisa berpindah tempat dengan cepat karena dukungan transportasi. Namun Jaringan Pelayanan Transportasi belum seluruhnya menyentuh ke daerah terpendi. Peningkatan Jaringan Pelayanan Transportasi dengan wilayah yang cukup luas dan tersebar sehingga membutuhkan pembagian urusan perhubungan ke kabupaten / kota, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan jaringan pelayanan transportasi yaitu :

- a. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Transportasi
- b. Melakukan Pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ

1.3.3 Peningkatan Pelayanan Simpul Transportasi

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) di jelaskan bahwa simpul transportasi adalah suatu tempat yang berfungsi untuk kegiatan menaikan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, mengatur perjalanan serta tempat perpindahan intramoda dan antarmoda. Keterpaduan jaringan pelayanan dan

prasarana transportasi dalam penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda yang efektif dan efisien diwujudkan dalam bentuk interkoneksi pada simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda yang dapat disebut sebagai terminal antarmoda (intermodal terminal).

Peningkatan Pelayanan Simpul Transportasi saat ini terlaksana namun belum berjalan dengan baik dikarenakan belum terpenuhinya SPM Pelayanan karena minim fasilitas untuk membuat Simpul Transportasi, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Simpul transportasi yaitu :

- a. Membuat kajian 17 titik lokasi potensial Pelabuhan Laut Pengumpulan Regional berdasarkan KP.432/2017 tentang RJPN
- b. Melakukan Pengembangan Terminal Tipe B

1.3.4 Kemacetan Lalu Lintas Lingkup Perkotaan

Faktor yang paling sering mengakibatkan kemacetan adalah padatnya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, sehingga mengakibatkan kinerja jalan berkurang namun untuk membangun infrastruktur transportasi diperlukan alokasi dana yang besar, adapun upaya yang dilakukan untuk mengurai kemacetan yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengurangi kemacetan
- b. Melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

1.3.5 Peningkatan Kinerja Prasarana Transportasi

Kinerja Prasarana transportasi menjadi isu strategis selanjutnya karena saat ini kinerja prasarana transportasi dirasa belum optimal karena untuk membangun prasarana transportasi diperlukan anggaran yang tidak sedikit namun untuk meningkatkan kinerja prasarana transportasi yang telah ada tetap dilakukan dan untuk mengukur tingkat kinerja prasarana transportasi telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap prasarana transportasi yang telah ada.

1.4 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendalakendala yang dihadapi dalam pencapaiannya
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja pada Perangkat Daerah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahun lalu dan perjanjian kinerja tahun pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024**

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI

Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan diarahkan pada tiga pilar utama yakni pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi yang berbasis lokal dan berwawasan ekologis, serta pembangunan prasarana dan sarana dasar.

Dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka pembangunan sektor perhubungan diprioritaskan pada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, menumbuhkan sifat profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM di bidang perhubungan.

2.1.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan transportasi Sumatera Selatan pada masa periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Perhubungan;
2. Mengoptimalkan fungsi simpul transportasi (Terminal, Stasiun, Pelabuhan dan Bandara);
3. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan;
4. Meningkatkan fungsi pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
5. Mengembangkan sistem angkutan yang berbasis angkutan massal.

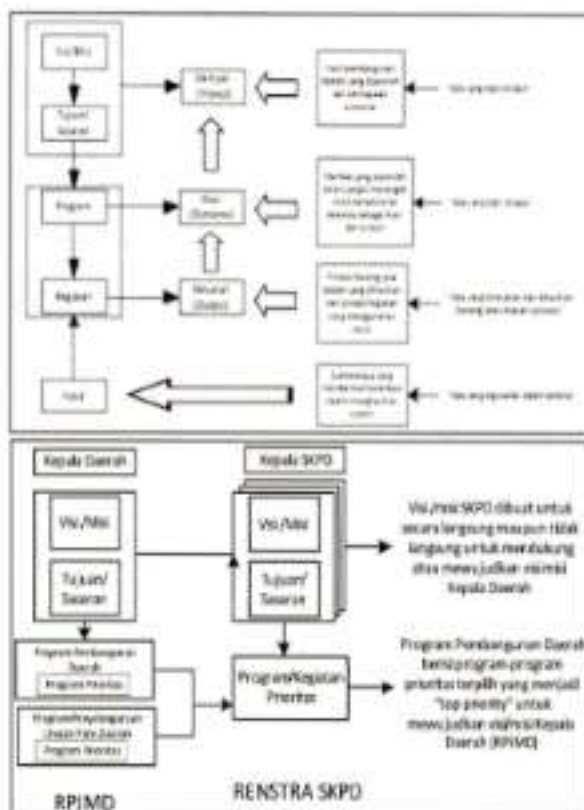
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi;
2. Meningkatnya Simpul Transportasi;
3. Keseimbangan Kebutuhan Angkutan;
4. Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas;

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PO

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
						2024	2025	2026	2028	
1.	Tercapainya pelayanan arus distribusi angkutan	Nilai arus distribusi arus barang	63.235.207 ton barang	[5] Meningkatnya Kinerja Transportasi	[6] Rasio Kinerja Transportasi	[7] 0,602	[8] 0,720	[9] 0,790	[10]	
						2 perbulan	2 perbulan	2 perbulan	2 perbulan	
		Nilai arus distribusi arus penumpang	10.683.181 penumpang		Jumlah terminal type B	7 terminal	7 terminal	7 terminal	7 terminal	
					Indeks Kejuruan Masyarakat (pilot)	69,10	70,50	71,15	71,15	
					On Time Performance Layanan Transportasi	57,80	58,90	59,30	59,30	
					Load factor penumpang Hardtop bus dan LRT	80	85	87	87	
					Load factor penumpang kapal laut	9	9	9	9	
					Load factor penumpang Bus ACSE	70	71	71	71	
					Load factor angkutan darat	64	70	71	71	
					Load factor angkutan laut	65	66	67	67	
					Load factor angkutan kereta api dan LRT	54	55	56	56	
					K/C Rasio Jalan Persegi	0,362	0,405	0,415	0,415	



Gambar 2.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Gambar 2.2 Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

Tabel 2.2 Penentuan Strategi

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konktivitas Transportasi	1. Penguatan jaringan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkerataapian 2. Penguatan jaringan pelayanan transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkerataapian 3. Membuka rute pelayanan kepentingan angkutan jalan dan sungai wilayah Sumatera Selatan 4. Pengembangan Terminal Terpadu Multimoda di Kayu Jaya Provinsi Sumatera Selatan; 5. Pengembangan Terminal Umum Tanjung Carot di Pelabuhan Tanjung Api api; 6. Mendorong peran swasta dalam pembangunan jalur khusus angkutan barang untuk memperkuat jalur logistik angkutan barang; 7. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Laku Lintas dan Angkutan Jalan (RI LJLU) Provinsi Sumatera Selatan;
2.	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah perabuhan laut pengumpun regional 3. Jumlah terminal tipe B	1. Mendorong proses PDD Pelabuhan Pengumpun Regional di Puskat; 2. Menyusun dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi dalam skala hierarki Pengumpun Regional; 3. Menyusun dokumen DUKR dan DUKP Pelabuhan Pengumpun Regional; 4. Mendorong BUMD untuk turut serta dalam mengelola pelabuhan pengumpun regional dengan skema Badan Usaha Pelabuhan 5. Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Jasa Usaha salah satunya dengan pengelakan ruang wilayah perairan dalam batas 12 mila laut untuk kepentingan kapal-kapalan; 6. Peningkatan kapasitas SDH Pelayaran 1. Peningkatan kinerja layanan 7 terminal tipe B Sumatera Selatan (Terminal Tipe B Jakabaring Palembang, KM 32 Indralaya, Randik Selayu, Petarang Lubuk Linggau, Kota Baru Martapura, Lubuk Harau OKU Timur serta Muara Duku OKU Selatan; 2. Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang; 3. Penerapan Standar Pelayanan

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
			Minimal (SPM) Terminal 4. Peningkatan kapasitas SCM Terminal;
3.	Keseluruhan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Penentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan public transport 2. Peningkatan capacity building SCM Perhubungan 3. Pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital 4. Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam 5. Adanya unit reaksi cepat penanganan keluhan lalu lintas dan keselamatan transportasi
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	1. Membuat kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja OTP; 2. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal Layanan Transportasi 3. Pembinaan bagi operator 4. Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi 5. Penerapan <i>Arwa's</i> and <i>Avalon</i> bagi operator layanan transportasi 6. Menyajikan konsep KPIU bagi badan layanan transportasi
		6. Load faktor penumpang kereta api	1. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan Transit <i>Ordnar Development</i> 2. Menyajikan bahan regulasi <i>statut preference</i> bagi pengguna angkutan umum; 3. Memperbaiki fasilitas integrasi dan dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT; 4. Melaksanakan integrasi pembayaran untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif; 5. Mensosialisasikan penggunaan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah; 6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkeretaapian;
		7. Load faktor penumpang kapal laut	1. Menyajikan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan; 2. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal; 3. Memberikan kejelasan informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal laut; 4. Transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya;

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
			5. Menekan kinerja On Time Performance bagi operator kapal untuk kepatuhan terjadwal; 6. Menerapkan kebijakan membeli layanan jasa angkutan laut;
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	1. Memperbaiki kinerja layanan Bus AKDP; 2. Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal bagi penumpang Bus AKDP; 3. Menekan kinerja On Time Performance sehingga terjadwal Bus AKDP dapat terlaksana; 4. Bus AKDP harus memenuhi uji kebalan plan kendaraan bermotor; 5. Menyediakan Bus Pengganti sebagai Sas Dura Operasi (SGO) jika terjadi hambatan dalam pelayanan; 6. Kecepatan informasi, transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 7. Menerapkan kebijakan membeli layanan jasa Bus AKDP;
		9. Load faktor angkutan barang darat	1. Memeratakan prasarana dan tata lanta untuk angkutan barang; 2. Menyediakan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan pergudangan; 3. Menyediakan sistem secara online antara terminal barang dengan pergudangan; 4. Memenuhi standar laik jalan kendaraan barang; 5. Pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (DDOL); 6. Pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel karosasi untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang diperkenankan dalam buku uji;
		10. Load faktor angkutan barang laut	1. Pemeliharaan alur pelayanan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal; 2. Meningkatkan kapasitas daya tampung dermaga di pelabuhan (DOK); 3. Meningkatkan kapasitas daya tampung apungan penampung (YOR); 4. Menurunkan dwelling time di pelabuhan; 5. Meningkatkan kinerja operasional pelayaran bengkel muat di pelabuhan;

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
			6. Menurunkan biaya THC di pelabuhan; 7. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan;
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	1. Peningkatan kapasitas tekanan gandar pada rel dengan penggantian rpi RSH; 2. Penambahan jalur ganda rel kereta api mengingat dengan skema KBU; 3. Penambahan shortcut jalur kereta api menuju terminal khusus, pelabuhan pengumpul lokal/regional/pengumpul/utama; 4. Dukungan infrastruktur jalur kereta api menuju Terminal Umum Tanjung Carat; 5. Perawatan lokomotif dan sarana perantara pengangkutan;
4.	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	1. Survei inventarisasi V/C ratio, LHK pada 73 ruas jalan provinsi; 2. Memperluas kebijakan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; 4. Melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas; 5. Menerapkan traffic manajemen melalui alat pengendali Automatic Traffic Control System (ATCS); 6. Menerapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang; 7. Koordinasi pelaksanaan persimpangan terkoordinasi;

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah pelayanan OPD maka diperlukan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan pertama ;

Untuk mewujudkan tujuan pertama yaitu "Meningkatnya Konektivitas Transportasi" dengan sasaran pertama yaitu :

- Rasio Konektivitas Transportasi;
- Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas.

2. Tujuan kedua ;

Untuk mewujudkan tujuan kedua yaitu "Meningkatnya Simpul Transportasi" dengan sasaran kedua yaitu :

- Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional;
- Jumlah terminal type B.

3. Tujuan ketiga :

Untuk mewujudkan tujuan ketiga yaitu "Keseimbangan Kebutuhan Angkutan" dengan sasaran ketiga yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- On Time Performance Layanan Transportasi
- Load faktor penumpang kereta api
- Load faktor penumpang kapal laut
- Load faktor penumpang Bus AKDP
- Load faktor angkutan barang darat
- Load faktor angkutan barang laut
- Load faktor angkutan barang kereta api

4. Tujuan keempat :

Untuk mewujudkan tujuan keempat yaitu "Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas" dengan sasaran keempat yaitu :

- V/C Ratio Jalan Provinsi.

2.1.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Adapun strategi dan kebijakan OPD untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut :

2.1.3.1 Sasaran Pertama

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pertama diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Rasio Konektivitas Transportasi

- a. Penguatan jaringan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian;
- b. Penguatan jaringan pelayanan transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian;
- c. Membuka rute pelayanan keberintisan angkutan jalan dan sungai wilayah Sumatera Selatan

- d. Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan;
- e. Pengembangan Terminal Umum Tanjung Carat di Pelabuhan Tanjung Api api;
- f. Mendorong peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan batubara untuk memperkuat jalur logistik angkutan barang;
- g. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RI LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan.

2. Jumlah Trip Perjalanan Kapal

- a. Pembangunan kolam pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api;
- b. Pengembangan kapasitas dermaga Penyeberangan Tanjung Api api;
- c. Optimalisasi waktu pelayanan bongkar muat pelabuhan.

2.1.3.2 Sasaran kedua

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kedua diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpukan Regional;

- a. Mendorong proses P3D Pelabuhan Pengumpukan Regional di Pusat;
- b. Menyiapkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi dalam skala hierarki Pengumpukan Regional;
- c. Menyiapkan dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpukan Regional;
- d. Mendorong BUMD untuk turut serta dalam mengelola pelabuhan pengumpukan regional dengan skema Badan Usaha Pelabuhan
- e. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Jasa Usaha salah satunya dengan pengelolaan ruang wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan kepelabuhanan;
- f. Peningkatan kapasitas SDM Pelayaran.

2. Jumlah Terminal Tipe B

- a. Peningkatan kinerja layanan 7 terminal tipe B Sumatera Selatan (Terminal Tipe B Jakabaring Palembang, KM. 32 Indralaya, Randik Sekaya, Petanang Lubuk Linggau, Kota Baru Martapura, Lubuk Harjo OKU Timur serta Muara Dua OKU Selatan);
- b. Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang;
- c. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Terminal
- d. Peningkatan kapasitas SDM Terminal.

2.1.3.3 Sasaran ketiga

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- a. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) layanan public transport
- b. Peningkatan capacity building SDM Perhubungan
- c. Pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital;
- d. Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam
- e. Adanya unit reaksi cepat penanganan kemacetan lalu lintas dan keselamatan transportasi

2. On Time Performance Layanan Transportasi

- a. Membuat kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja OTP;
- b. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal Layanan Transportasi
- c. Pembinaan bagi operator
- d. Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi
- e. Penerapan Rewards and Punishment bagi operator layanan transportasi;
- f. Menyapkan konsep KPBU bagi badan layanan transportasi.

3. Load Faktor Penumpang Kereta Api

- a. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan Transit Oriented Development;

- b. Menyiapkan bahan regulasi stated preference bagi pengguna angkutan umum;
- c. Menyediakan fasilitas integrasi dari dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT;
- d. Melaksanakan integrasi pembayaran untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif;
- e. Mensosialisasikan penggunaan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah;
- f. Penerapan Standart Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkeretaapian;

4. Load Faktor Penumpang Kapal Laut

- a. Menyiapkan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan;
- b. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal;
- c. Memberikan kepastian informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal laut;
- d. Transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya;
- e. Menaikan kinerja On Time Performance bagi operator kapal untuk kepastian penjadwalan;
- f. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada jasa angkutan laut.

5. Load Faktor Penumpang Bus AKDP

- a. Memperbaiki kinerja layanan Bus AKDP;
- b. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal bagi penumpang Bus AKDP;
- c. Menaikan kinerja On Time Performance sehingga penjadwalan Bus AKDP dapat terlaksana;
- d. Bus AKDP harus memenuhi uji kelakuan jalan kendaraan bermotor;
- e. Menyiapkan Bus Pengganti sebagai Siap Guna Operasi (SGO) jika terjadi hambatan dalam pelayanan;
- f. Kepastian informasi, transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya;

- g. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada layanan jasa Bus AKDP.

6. Load Faktor Angkutan Barang Darat

- a. Merencanakan jaringan prasarana dan lalu lintas untuk angkutan barang;
- b. Menyiapkan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan pergudangan;
- c. Menyiapkan sistem secara online antara terminal barang dengan pergudangan;
- d. Memenuhi standart laik jalan kendaraan barang;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL);
- f. Pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel karoseri untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam buku uji.

7. Load Faktor Angkutan Barang Laut

- a. Pemeliharaan alur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal;
- b. Meningkatkan kapasitas daya tampung dermaga di pelabuhan (BOR);
- c. Meningkatkan kapasitas daya tampung lapangan penumpukan (YOR);
- d. Menurunkan dwelling time di pelabuhan;
- e. Meningkatkan kinerja operasional peralatan bongkar muat di pelabuhan;
- f. Menurunkan biaya THC di pelabuhan;
- g. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan.

8. Load Faktor Angkutan Barang Kereta Api

- a. Peningkatan kapasitas tekanan gandar pada rel dengan penggantian rel R54;
- b. Penambahan jalur ganda rel kereta api eksisting dengan skema KPBU;
- c. Penambahan shortcut jalur kereta api menuju terminal khusus, pelabuhan pengumpulan local / regional / pengumpul / utama

- d. Dukungan infrastruktur jalur kereta api menuju Terminal Umum Tanjung Carat;
- e. Perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut;

2.1.3.4 Sasaran keempat

1. Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan

- a. Memenuhi standart pelayanan minimal pemenuhan fasilitas keselamatan LLAJ pada 73 ruas jalan provinsi;
- b. Menyusun dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ;
- c. Memperbaiki kondisi jalan mantap (crosscutting dengan Dinas PU BM);
- d. Memprioritaskan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan dan ruas jalan berkeselamatan;
- e. Mengoptimalkan kembali fungsi Forum LLAJ;

Tujuan OPO	Sarana/Strategi (SS)	Indikator Kinerja Utama/Strategis (IKUS)	Strategi	Kebijakan
		5. Muluksuda di Kanyo Jaya Provinsi Sumatera Selatan 6. Pengembangan Terminal Unsur Tanjung Laut di Pelabuhan Tanjung Api Api, mendukung peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan bus/dara untuk mempermudah jalur logistik angkutan barang. 7. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lintas Darat Angkutan Jalan (RELIJA) Provinsi Sumatera Selatan.	1. Muluksuda di Kanyo Jaya Provinsi Sumatera Selatan 2. Pengembangan Terminal Unsur Tanjung Laut di Pelabuhan Tanjung Api Api, mendukung peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan bus/dara untuk mempermudah jalur logistik angkutan barang. 3. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lintas Darat Angkutan Jalan (RELIJA) Provinsi Sumatera Selatan.	a. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang disekitar, barang, Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi b. Pemetaan Kebutuhan Fasilitas untuk Pelayanan Angkutan Fasilitas yang Menempati Baris 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi c. Pemetaan Rencana Lintas Jaringan Trayek Pedesaan yang Melintasi 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Pemetaan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Pengumpulan Taksi dalam Kawasan Fasilitas yang Wilayah Operasinya Melintasi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengembangan Pelayanan : a. Penetapan Lini Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Beroperasi dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi, meliputi: b. Penetapan Lini Usaha Angkutan Laut Pelayanan Logistik bagi Cabang Perikanan atau Badan Usaha yang Beroperasi dan yang Beroperasi pada Lintas Pedesaan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, meliputi:

Tujuan CPO	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama Strategi (IKSS)	Strategi	Kegiatan
				c. Penelitian Tesis Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Menyempit Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Berperbatasan; d. Penelitian Untuk Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jempolan Jalan Provinsi di antara Jempolan Jalan Provinsi ke Provinsi; e. Penelitian Untuk Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Pengoperasian untuk Kapal yang Melintas Penyelenggaraan Untuk Pemeliharaan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penelitian Kencana Jarak dan Daerah Lintasan Kargo (Dukur) Daerah Lintasan Penyelenggaraan (DUP) Pelabuhan Pengangkutan Regional; g. Penelitian, Penelitian Tesis Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan angkutan Regional Pemeliharaan dan Pemeliharaan Tesis Pemeliharaan Sungai dan Danau yang Melintas Trayek Lintasan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; h. Penelitian Tesis Untuk Bedah Uraian Pemeliharaan di Pemeliharaan Pengangkutan Regional; i. Penelitian Tesis Penyelenggaraan Pemeliharaan Selama 24 Jam untuk Pemeliharaan Pengangkutan Regional; k. Penelitian Tesis Penyelenggaraan Terminal untuk Koperatif Selam (TUS) di dalam

Tujuan CDP	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				ES/NU/UP Pedesaan Pengangkutan Regional 4. Program Pengembangan Perantara/parat: - Pembangunan Bantalan Untuk Perantara/parat - Pembangunan Tim Usaha, Site Penitijngan dan Ite Operasi Perantara/parat - Unit yang Jaringin Jalannya Melalui Bantalan 5. Pengembangan Jaringin Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melalui Wilayah 1 (Jalur) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: - Pembangunan Kaki Stasiun untuk Stasiun pada Jaringin Jalur Kereta Api Provinsi - Pembangunan Tim Operasi Samping Perantara/parat untuk yang Jaringin Jalannya Melalui Satu Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: - Pembangunan Jaringin Pelayanan Perantara/parat pada Jaringin Jalur Perantara/parat Provinsi - Pembangunan Tim Pengangkutan atau Perantara/parat Perantara/parat Khusus, Tim Operasi dan Perantara/parat Jalur Kereta Api khusus yang Jaringannya Melalui 1 (Jalur) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	Jumlah btp perantara/parat	- Pembangunan tidak dilakukan pada perantara/parat perantara/parat Jalur Api - Pembangunan tidak dilakukan dengan Perantara/parat Jalur Api etc - Optimalisasi waktu pelayanan bantalan must dilakukan	- Program Pengembangan Jaringin Perantara/parat Daerah Provinsi - Program Pengembangan Jaringin Perantara/parat - Pembangunan Tim Usaha Angkutan Laut Bantalan Usaha yang Beroperasi dalam Wilayah dan Bantalan pada Unit Perantara/parat melalui Kabupaten/Kota	

Tujuan OPR	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kegiatan
				b. Sistem Wilayah Daerah Provinsi: Perencanaan Lini Usaha Angkutan Laut, Perencanaan Rakyak 2020, Caring, Perencanaan atau Sistem Usaha yang Berorientasi dan yang Berorientasi pada Lintasan Pedalaman antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pedalaman antar Daerah Provinsi, dan Pedalaman Internasional; Perencanaan Lini Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Darat untuk Kapal yang Berkahar, Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; Pendidikan Lintasan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pengelolaan Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan 2020 Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; c. Pendidikan Lintasan Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pengelolaan untuk Kapal yang Melayani Penyelenggaraan Lintasan Pedalaman antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1. (untuk Daerah Provinsi), dan Pendidikan Rencana Intak dan Daerah Lintasan Kerja (DUR) Daerah Lintasan Raporansi (DUR) Pedalaman Penyelenggaraan Regional; d. Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan 1. Pendidikan Lini Usaha Angkutan Laut, Bep, Sistem Usaha yang Berkahar dalam Wilayah dan Berorientasi Lintasan Lintasan Pedalaman antar Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan Kualitas Sistem Transportasi		3. Jumlah pelatihan dan peningkatan regional	1. Mendukung proses P3G Pedalaman Penyelenggaraan Regional di Provinsi; 2. Menyajikan dan/atau Rencana Intak Pedalaman Provinsi dalam skala Nasional (Pengembangan Regional); 3. Menyajikan dan/atau DUR dan DUR Pedalaman Pengembangan Regional;	1. Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan 1. Pendidikan Lini Usaha Angkutan Laut, Bep, Sistem Usaha yang Berkahar dalam Wilayah dan Berorientasi Lintasan Lintasan Pedalaman antar Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan OPD	Strategic Strategy (SS)	Indicator Kinerja Strategis (IKS)	Subsidi	Kebijakan
		4. Mendukung BUKD untuk turut serta dalam mengkoordinasikan pengurusan regional dengan daerah lain dan daerah kabupaten/kota. 5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja.	1. Mendukung BUKD untuk turut serta dalam mengkoordinasikan pengurusan regional dengan daerah lain dan daerah kabupaten/kota. 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja.	1. Mendukung BUKD untuk turut serta dalam mengkoordinasikan pengurusan regional dengan daerah lain dan daerah kabupaten/kota. 2. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 5. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja. 6. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan tenaga kerja.

Tujuan CPC	Secara Strategis (CS)	Indikator Kinerja Utama Strategis (IKUS)	Strategi	Kebijakan
			- Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang - Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terminal - Peningkatan kapasitas SPM Terminal	- Pengadaan Terminal Perumpang Tipe B - Bersyusun Rencana Pengembangan Terminal Perumpang Tipe B - Peningkatan Gedung Terminal - Pengembangan Service dan Apresiasi Terminal - Rehabilitasi dan Perbaikan Terminal (Pavimen, Ubin dan Puncak) - Peningkatan Kapasitas SPM Mengikuti Terminal Tipe B
	memperluas kebutuhan Angkutan	Indeks Kepuasan Masyarakat (2024)	- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan public transport - Peningkatan capacity building SPM - Peningkatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital - Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam - Adanya unit reaksi cepat penanganan keluhan dari infan dan keselamatan transportasi	- Program Persempangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Program Pengembangan Lintas Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Pengadaan Terminal Perumpang Tipe B - Pelaksanaan Manajemen dan Bakuhyas Laju Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi - Pengadaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang - Aspek Konektivitas dan/atau Daerah Persempangan - Peningkatan kelayakan pelayanan untuk pelayanan angkutan kendaraan yang beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Pengadaan Rencana Umum Jaringan - Terbuka Adanya dengan Daerah Persempangan dan Rencana yang meliputi SPM 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pengadaan Rencana Umum Jaringan - Terbuka Persempangan yang meliputi SPM 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Peningkatan pelayanan Angkutan - Peningkatan pelayanan Angkutan

Tujuan OPR	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Strategis (IKS)	Strategi	Kegiatan
				Kemampuan Pemetaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi n. Percepatan Tarif Kedis Dukung untuk Angkutan Orang yang Meliputi Tripek antar kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Pemukiman Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Penyelidikan Pelayanan : a. Penelitian dan Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisil dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pemukiman antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penelitian dan Usaha Angkutan Laut Penelitian Kelayak bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang Berdomisil dan yang Beroperasi pada Lintas Pemukiman antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Perseorangan antar Daerah Provinsi, dan Perseorangan Internasional; c. Penelitian dan Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Darat untuk Kapal yang Meliputi Tripek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Berangkutan; d. Penelitian Lintas Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jangkauan Jarak Provinsi yang Terletak Jarak Kota ke Kota dan Provinsi lainnya dengan Jarak Kota ke Kota dan Provinsi lainnya.

Tujuan OMD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				6. Penetapan Lirisasi Penyediaan dan Penyaluran Pengiriman untuk Kapal yang Melintas Persebaran Lirisasi Penyaluran antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 7. Penetapan Rencana Jadwal dan Daerah Lingkup Kerja (DURK) Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Instansi Pengumpul Regional; 8. Pembentukan, Penerimaan dan Pengembangan dan Pengembangan Regional 9. Pengembangan dan Perbaikan Lirisasi Penyaluran dan Perbaikan Lirisasi Penyaluran Lirisasi Daerah yang Melintas Tripartit Daerah Provinsi; 10. Perbaikan Lirisasi Usaha untuk Badan Usaha Perbaikan di Pedesaan Pengumpul Regional; 11. Perbaikan Lirisasi Pengembangan Penyaluran Selama 24 Jam untuk Pedesaan Pengumpul Regional; 12. Penetapan Lirisasi Pengembangan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUS) di dalam DLKP/DLKP Perbaikan Pengembangan Regional; 13. Penetapan Tarif Angkutan Penyaluran Penyaluran Kelas Ekonomis dan Mendorong Berapa Muatannya pada Lirisasi Penyaluran antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 14. Program Pengembangan Perbaikan : a. Penelitian dan Riset Lirisasi Perbaikan; b. Penelitian Lirisasi Usaha, Lirisasi Pengembangan

Tujuan CPO	Strategi	Kebijakan
Indikator Kinerja Utama Sustainability (IKSU)		dan Tim Operasi Prastama Perencanaan Umum yang Jaringannya Memiliki Manfaat Dampak c. Perencanaan Jaringan Jalur Kemudi Aji yang Jaringannya Memiliki Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Perencanaan Kadas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kemudi Aji Prastama; e. Perencanaan Tim Operasi Sarana Perencanaan Umum yang Jaringan Jalurnya Memiliki Sifat Dampak Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Perencanaan Jaringan Persebaran Perencanaan pada Jaringan Jalur Persebaran Provinsi; g. Perencanaan Tim Perencanaan Jala Perencanaan Perencanaan Khusus Tim Operasi, dan Perencanaan Jalur Kemudi Aji Khusus yang Jaringannya Memiliki 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
6. On Time Performance Layanan Transportasi	- Memiliki kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja GTR; - Mempunyai Standar Pelayanan Minimal Layanan Transportasi; - Pemeriksaan bagi operator; - Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi; - Pemetaan Rewards and Punishment bagi operator layanan transportasi; - Mempunyai konsep IPRO bagi badan layanan transportasi;	- Program Revitalisasi Urutan Perencanaan Dampak Provinsi; - Program Perencanaan Jalur Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : - Pengadaan Terminal Persebaran Tipe B; - Kepulauan Marjinal dan Kabupaten Laju Lintas untuk Jaringan Jalur Provinsi; - Perencanaan Angkutan Umum untuk Jalur Angkutan Orang dan Jalur Angkutan Arter Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; - Perencanaan Koneksi Persebaran untuk

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Strategis (IKS)	Strategi	Kebijakan
				Keputusan Angkutan Perhubungan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi a. Rencanan Rancangan Umum Jaringan Trayek Antar-kota dalam Daerah Provinsi dan Perhubungan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota c. Rencanan Rancangan Umum Jaringan Trayek Persebaran yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam (satu) Daerah Provinsi d. Rencanan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Merogundek Tolol dalam Rencanan Perhubungan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Rencanan Tarif Keba Ekonomi Untuk Angkutan Orang yang Melampaui Trayek antar kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Persebaran dan Persebaran yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengembangan Pelayanan: a. Peningkatan Layanan Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang bermitra dengan Wilayah dan Beroperasi pada Urutan Persebaran antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Peningkatan Layanan Angkutan Laut Pesegaran Rakyat bagi Orang Perantauan atau Badan Usaha yang Beroperasi dan yang Beroperasi pada Urutan Persebaran antar

[illegible]

Tujuan CPO	Seluruh Strategi (SS)	Indikator Kinerja Satuan Strategi (IKSS)	Strategi	Ketajutan
				Pengembangan Regional; a. Peningkatan dan Pengembangan Terminal untuk Keperluan Sendiri (TKUS) di dalam DLU/ODL Pedalaman Pengiriman Regional; b. Peningkatan Tarif Angkutan Penyelenggaraan Penumpang Kelas Ekonomi dan kendaraan lainnya Muatannya pada Unitas Penyelenggaraan antar Daerah; c. Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi d. Program Pengelolaan Persewaan: a. Penelitian Rencana Induk Persewaan; b. Penelitian Uji Usaha, Uji Peningkatannya dan Uji Operasi Prasarana Persewaan; c. Unitas yang Jangka Jauhnya Meliputi Bus dan Daerah; d. Penelitian Jaringan Jalur Kendaraan yang Jangka Jauhnya Meliputi Wilayah 1 (atau Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (atau) Daerah Provinsi); e. Penelitian Kelayakan untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kendaraan Provinsi; f. Penelitian dan Operasi Serong Persewaan Umum yang Jaringan Jangka Jauhnya Meliputi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (atau) Daerah Provinsi; g. Penelitian Jaringan Pedayaan Persewaan pada Jaringan Jalur Persewaan Provinsi; h. Penelitian dan Pengembangan Persewaan Khusus, dan Operasi, dan Penelitian Jalur Kendaraan Khusus yang Jaringan Meliputi 1 (atau) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (atau) Daerah Provinsi.

Tujuan CPO	Sebaran Biringah (SS)	Indikator Kinerja Sebaran Strategies (IKSS)	Strategi	Kerjasama
7. Load faktor penumpang kereta api			1. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan Transit Oriented Development; Menyediakan bahan regulasi TODOD preferensi bagi pengguna angkutan umum; 2. Menyediakan fasilitas integrasi dari dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT; 3. Merencanakan integrasi penyediaan untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif; 4. Memfasilitasi pengumpulan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan nyaman; 5. Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkotaan;	1. Program Persempangan Urutan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengadaan Pelebaran : a. Penetapan Rencana Induk Perencanaan; Persebaran Jari Lintas, Lini Persebaran dan Lini Operasi Persebaran Persebaran Umum yang Jangkauan Jalannya Meliputi Seluruh Daerah; 3. Persebaran Jaringan Jalur Kereta Api yang Jangkauan Meliputi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 4. Persebaran Rute-Sistem untuk Sistem pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; 5. Persebaran Lini Operasi Selama Persebaran Umum yang Jangkauan Jalannya Meliputi Seluruh Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; 6. Persebaran Jaringan Persebaran Persebaran pada Jaringan Jalur Persebaran Provinsi; 7. Persebaran Lini Persebaran atau Persebaran Persebaran Khusus, Lini Operasi, dan Persebaran Jalur Kereta Api khusus yang Jangkauan Meliputi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
8. Load faktor penumpang kapal laut			1. Menyediakan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan; 2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal; 3. Menyediakan ketersediaan informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal laut;	1. Program Persempangan Urutan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengadaan Pelebaran : a. Persebaran Lini Usaha Angkutan Laut kapal besar/ukura yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lantai

[illegible]

[illegible]

Tujuan CPO	Sebaran Bungkup (BS)	Indikator Kinerja Satuan Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				Tingkat Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penataan Wilayah Operasi Angkutan Otong dengan Mempertahankan Taksa dalam Kawasan Perbatasan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Menetapkan Tarif Kaki Besi untuk Angkutan Orang yang Melayani Transaksi antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perbatasan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10. Lower kelas angkutan barang dasar			1. Merencanakan jaringan distribusi dan lumbung 2. Lintas untuk angkutan barang: 1. Menyediakan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan perdesaan; 2. Menyediakan sistem secara online antara terminal barang dengan perdesaan; 3. Menyediakan standar dan jalan kendaraan barang; 4. Pengawasan dan pendistribusian terhadap Over Dimension Over Loading (OODOL); 5. Pengawasan dan pembinaan terhadap barang kargo untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam buku up.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengembangan Lulu Lintas Dan Angkutan Jalan (LULU) : a. Pengadaan Terminal Penunjang Tipe B b. Penataan dan pengalihan SRT Kabupaten Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dengan Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penataan Kawasan Perdesaan untuk Penataan Angkutan Perdesaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan dan Perbaikan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 3. Tarif Antar Kota dalam Daerah Provinsi

Tujuan CRO	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				f. Pendidikan Berkarya Lintas dengan Triyektas Pelajaran yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Pendidikan Wilayah Operasi Angkutan Orang Lintas Mengunjungi Tesis dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Pendidikan Tarif Kotak Ekstrem untuk Angkutan Orang yang Melampaui Triyektas antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11. Load faktor angkutan barang laut			1. Perencanaan arus pelayaran untuk mempertahankan kapasitas meningkatkan kapasitas daya angkut kapal; 2. Meningkatkan kapasitas daya tangkang dermaga di pelabuhan (BOR); 3. Meningkatkan kapasitas daya tangkang layanan penunjang (NCR); 4. Meningkatkan dwelling time di pelabuhan; 5. Meningkatkan kinerja operasional; 6. Peralatan bongkar muat di pelabuhan; 7. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan.	1. Program Penunjang Urutan Pemertanahan Daerah Provinsi 2. Program Pengembangan Pelayanan a. Penetapan Lini Usaha Angkutan Laut bagi lada dan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi b. Penetapan Lini Usaha Angkutan Laut Meliputi Kapal bagi Orang Pergerakan atau Sejenis Usaha yang Berdomisili dan beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional c. Pendidikan Lini Triyektas Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Darat untuk Kapal yang Meliputi Triyektas antar Daerah

Tujuan CPO	Teknik Strategi (ST)	Indikator Kinerja Utama: Strategi (IKUS)	Strategi	Kolaborasi
				kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang bersangkutan; d. Peningkatan Lintas Perhubungan dan Peningkatan Penguasaan Kapal antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Tersebut pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Pantai Air Provinsi; e. Peningkatan Lintas Penyerbangan dan Penguasaan Penguasaan untuk Kapal yang Melayani Penyerbangan Lintas Kabupaten antar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan f. Peningkatan Rencana induk dan Daerah Lingkungan kerja (DULK) Daerah Lingkungan Kerja (DLK) Kabupaten/Lingkungan Regional; g. Peningkatan, Peningkatan Lini Penguasaan dan Penguasaan Pedalaman; Penguasaan Regional; Peningkatan dan Peningkatan Lini Pedalaman Sungai dan Daerah yang Melayani Tersebut Lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; h. Peningkatan Lini Usaha untuk Badan Usaha Pedalaman di Pedalaman Peningkatan Regional; i. Peningkatan Lini Usaha Penguasaan Pedalaman Saluran 24 Jam untuk Pedalaman Peningkatan Regional; k. Peningkatan Lini Penguasaan Terminal untuk Peningkatan Sederhana (TPUS) di dalam DULK/DLK Pedalaman Peningkatan Regional; l. Peningkatan Tarif Angkutan Peningkatan, Peningkatan, Ketersediaan, Efisiensi, Efisiensi.

[illegible]

Tujuan OPD	Sistem Strategi (SS)	Indikator Kinerja Sistem Strategis (IKSS) jika relevan/terkait	Strategi	Kegiatan
	Lintas Lintas		- Keselamatan (LUK) Memportali kondisi jalan melalui (moneviting dengan Dinas PU BM) - Memportali pemangangan Damsi Rawan Kecelakaan dan road plan berkeadilan; - Mengoptimalkan kembali fungsi Forum LUK; - Pertinaan dan pengawasan terhadap Balai Pengawasan Kendaraan Bermotor untuk laik jalan kendaraan bermotor; - Melaksanakan audit inspeksi keselamatan jalan; - Melaksanakan portofolio dan sosialisasi terhadap budaya keselamatan berlalu lintas pada unit dlm; - Memastikan kegiatan road safety role.	- Pembuatan Rencana Teknik Jaringan (LUK) Provinsi - Penyediaan Perlebaran Jalan di Jalan Provinsi - Perbaikan Perlebaran Jalan di Jalan Provinsi - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlebaran Jalan - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlebaran Jalan - Pengadaan Terminal Pemungut Tipe B - Rehabilitasi Manajemen dan Keamanan Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi - Pasokan Mutu Jalan dan Keamanan Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - Pengadaan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlebaran Jalan di Jalan Provinsi - Upi Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Keamanan Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi - Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Pelaksanaan Kegiatan untuk Jalan Provinsi - Forum Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi - Peringatan Hari Analisis Dampak Lintas (Andalin) untuk Jalan Provinsi - Pembuatan Kebijakan Tata Kelola Andalin - Pengawasan Kapasitas Perlebaran Andalin - Kepatuhan dan Sertifikasi Berjalan - Mengawasi dan Melakukan Rekomendasi Andalin - Audit dan Inspeksi Keselamatan LUK di Jalan - Peningkatan Kapasitas Auditor dan

Tujuan OPO	Sarana Strategis (SS)	Indikator Kinerja Satuan Strategis (IKSS)	Strategi	Ketepatan
				Inspektur UAA) 1. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Up Bakti Kendaraan Bermotor 4. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 5. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kumpalan Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 6. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perhubungan Angkutan Umum 8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jaka Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 9. Penetapan Kawasan Perbatasan yang Pedesaan Angkutan Perbatasan yang Mendapat Jarak 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 10. Penyediaan Rencana Umum Jaringan Trayek Antar-Kota dalam Daerah Provinsi dan Kelurahan yang Mendapat Jarak 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 11. Penyediaan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Mendapat 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 12. Penyediaan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perbatasan yang Wilayah Operasinya Mendapat 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Tujuan OPO	Strategi	Kebijakan
Indikator Kinerja Utama Efisiensi (KIS)	Indikator Kinerja Utama Efisiensi (KIS)	Indikator Kinerja Utama Efisiensi (KIS)
14. Rasio Fasilitas Kecelakaan Transportasi per 1 juta kendaraan/kilometer	1. Memeritisi standar pelayanan minimal pemerintah fasilitas keselamatan LAA pada 73 ruas jalan provinsi 2. Menyusun dokumen Rencana Aksi Keselamatan LAA 3. Menetapkan kondisi jalan mandiri (roadside) dengan Dinas PU (BPT) 4. Memeritisi standar pelayanan minimal Keselamatan dan keselamatan 5. Mengembangkan kemitraan Forum LAA 6. Membantu dan koordinasi terhadap tidak penguatan kendaraan bermotor untuk laik jalan kendaraan bermotor 7. Melakukan audit inspeksi keselamatan jalan 8. Melakukan penelitian dan sosialisasi terhadap budaya keselamatan beratu lintas pada lintas diri 9. Menetapkan kebijakan road safety note	cc. Penelitian Tarif Kabin E-konsep untuk Angkutan Orang yang Masyarakat Tersebut akan Kuda dalam Daerah Provinsi untuk Angkutan Perseorangan dan Perseorangan yang Masyarakat 1. (Lain) Daerah Kabupaten Kota dalam 1 (pulu) Daerah Provinsi 1. Program Penunjang Layanan Perseorangan Daerah 2. Program Penyelenggaraan Lintas Lintas Dan Angkutan Jalan (LAA) : a. Penyelenggaraan Inspeksi Jalan (LAA) Provinsi b. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan di Jalan Provinsi c. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan di Jalan Provinsi d. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan e. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan f. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan g. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan h. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan i. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan j. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan k. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan l. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan

Tujuan OPO	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Satuan Strategis (IKSS)	Strategi	Kegiatan
				untuk Jaringan Jalan Provinsi 11. Pendidikan Hasil Abstrak Dampak Lalu Lintas (Andelatin) untuk Sebel Provinsi 12. Penelitian Kelayakan Tata Kelola Andelatin 13. Meningkatkan Kapasitas Pembiayaan Andelatin 14. Koordinasi dan Sinergisasi Pembiayaan Andelatin 15. Pengamanan Pelaksanaan Rekonstruksi Andelatin 16. Audit dan Inspeksi Kelayakan LLAJ di Jalan 17. Mengalokasikan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 18. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemeriksaan Unit Pelaksanaan Uj Rekrutasi 19. Koordinasi dan Inspeksi, Audit dan Pemeriksaan Terminal 20. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetisi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 21. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemeriksaan Sistem Pemenuhan Kelayakan Perumahan Angkutan Umum 22. Penyelidikan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan barang 23. Angkutan Orang dan barang Provinsi 24. Pembiayaan Kelayakan Perumahan untuk Penyelenggaraan Perumahan yang Berorientasi Sosial 1 (atau) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (atau) Daerah Provinsi 25. Pembiayaan Kelayakan Umum Jaringan Transpor Antar-kota dalam Daerah Provinsi dan Perhubungan 2020, Monev, Babas 1

Tujuan OPO	Sasaran Strategy (SS)	Indikator Kinerja Strategis (IKSS)	Strategi	Kegiatan
				(satu) Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Rencana Umum Jaringan Tayak Bedakan yang Melayani 1 (satu) Daerah kabupaten dalam (satu) Daerah Provinsi 56. Perencanaan Wilayah Operasi Angkutan Daerah dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Meliputi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 57. Perencanaan Tarif Kena Ekstensi untuk Angkutan Orang yang Melayani Tayak antar kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melayani 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
	15. V/C Rasio Jalan Provinsi		1. Survey inventarisasi V/C ratio, LRT pada 71 ruas jalan provinsi 2. Menempatkan kegiatan penyesuaian Analisis Cengkang LRT Jalan 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Auditus Cengkang LRT Jalan 4. Melakukan penanganan masalah LRT Jalan 5. Penerapan Traffic management melalui alat pengendali Automatic Traffic Control System (ATCS) 6. Melakukan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan berhenti 7. Optimalisasi sistem transportasi perkolaborasi	1. Program Pemungutan Urutan Pemertajahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan LRT Jalan dan Angkutan Jalan (LRTJ) 3. Perencanaan Rencana Intak Jaringan LRTJ 4. Program Penyediaan Perlongkangan Jalan di Jalan Provinsi 5. Pemertajahan Peraturan Jalan di Jalan Provinsi 6. Pemertajahan dan Pemertajahan Peraturan Jalan Provinsi dan pemertajahan Perencanaan Jalan 7. Pengadaan Terminal Pemungutan Tipe B Perencanaan Jaringan dan Melayani LRTJ Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 8. Penelitian Monitoring dan Revisi LRTJ

Tujuan DPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
				1. Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi Pengadaan, Perawatan, Pembiayaan dan Peningkatan Peningkatan Jalan dalam rangka Manajemen dan Kebijakan Lintas Uji Coba dan SDB/DBSP Pelaksanaan Manajemen dan Kebijakan Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 2. Pengembangan dan Penguatan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 3. Forum Lintas Untuk dan Anggaran Jalan Untuk Jaringan Jalan Provinsi 4. Penetapan Hasil Analisis Dampak Lintas Untuk (Andalin) untuk Jalan Provinsi Kondisi Kebijakan Teta Kewilayatan Peningkatan Kapasitas Perda Andalin Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Hasil Andalin 5. Pengembangan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin 6. Audit dan Inspeksi Kemandirian LLAJ di Jalan 7. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 8. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Peningkatan Unit Pelaksana Uji Bersama Kendaraan Bermotor 9. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Peningkatan Timorol 10. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kendaraan Bermotor Provinsi Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Peningkatan Sistem Manajemen

Tujuan (MD)	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan Konsolidasi: Penyelesaian Angkutan Umum
				a. Penyelesaian Angkutan Umum untuk Jarak Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi b. Penyelesaian Angkutan Perantara untuk Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi c. Penyelesaian Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penyelesaian Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penyelesaian Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi f. Penyelesaian Tarif Kaki Besi Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melampaui Trayek Antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perantara dan Perantara yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.2 RENCANA KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, adapun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1 Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,690
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2 Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	Pelabuhan	2
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3 Jumlah Terminal Tipe B	Terminal	7
			4 Load Factor Penumpang Kereta Api	%	80
			5 Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9
			6 Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	70
			7 Load Factor Angkutan Barang Darat	%	69
			8 Load Factor Angkutan Barang Laut	%	55
			9 Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	54
			10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	69,10
			11 On Time Performance Layanan Transportasi	%	57,80
4		Menurunnya Kejenuhan Arus Laju Lintas	12 V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,392

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 tertuang pada Tabel 2.5 dibawah ini :

Tabel 2.5 Program Kegiatan Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi		42.705.501.005
	I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		235.000.000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	70.000.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan		20.064.268.080
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan PNS	1878 Orang/Bulan	19.720.045.727
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Orang	299.222.353
10	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tidak Lengkap Pemeriksaan	1 Dokumen	30.000.000
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah		150.500.000
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	65.500.000
13	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	85.000.000
iv	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis		939.000.000
14	Pengadaan Pakan Dinas Beserta Alat/ut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Beserta Alat/ut Kelengkapannya	348 Paket	600.000.000
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000
16	Sosialisasi Peraturan Penunjang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Penunjang-Undangan	200 Orang	139.000.000

17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD		1.873.704.294
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	30.000.000
19	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	514.585.000
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	25 Paket	30.000.000
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103.502.827
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Penerangan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	20.000.000
23	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	182.442.750
24	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	100.000.000
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	873.173.717
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kantor		7.715.240.000
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000

28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	860.697.000
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	6.849.543.000
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang terpelihara		11.727.788.631
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit	190.500.000
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	32 Unit	594.500.000
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	301.565.331
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.501.223.300
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	412 Unit	150.000.000
viii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang tersedia		

35	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Dinas Lapangan yang Tersedia	1 Unit R4	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 Juta Keberangkatan		3.776.848.190
	i Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia		1.538.848.190
	36 Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Unit	1.538.848.190
II	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah terminal tipe B yang dikelola		556.000.000
	37 Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	4 Unit	300.000.000
	38 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Tersejahtera dan Tersejahtera	2 Unit	256.000.000
III	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		882.000.000
	39 Pengadaan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	4 Unit	252.000.000
	40 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	1 Laporan	550.000.000
41	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1 Laporan	80.000.000

iv	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Provinsi	Jumlah Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Provinsi	
42	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalin	1 Laporan
v	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	375.000.000
43	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ	2 Orang
44	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1 Laporan
45	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	1 Laporan
46	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan umum	Jumlah Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersedia	1 Laporan
vi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	195.000.000
47	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6 Unit

48	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	1 Laporan	34.980.000
VII	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan		230.000.000
49	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Laporan	130.000.000
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kawasan Provinsi	1 Laporan	100.000.000
III	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah Trip Perjalanan Kapal		2.821.742.200
I	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Jumlah Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau		262.704.300

51	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	262.704.300
II	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkup Kerja (DLKR)/Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan yang memiliki RIP dan DLKR/DLKP		
52	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkup Kerja (DLKR)/Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkup Kerja (DLKR)/Daerah Lingkup Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Regional	1 Dokumen	
III	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang dibangun		1.229.912.900
53	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpulan Regional	1 Dokumen	430.470.000
54	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpulan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpulan Regional yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	799.442.900
IV	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Menyayangi Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau		1.179.125.000

55	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Penanaman Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Penanaman Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	775,183,500
56	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	403,941,500
V	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan		150,000,000
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Regional	1 Laporan	150,000,000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Jumlah Penumpang Kereta Api		223,197,173
I	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Meliputi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Panjang Jaringan Jalur Kereta Api yang Menjadi Kewenangan Provinsi		80,000,000
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	80,000,000

II	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Panjang Jaringan Pelayanan Kereta Api yang menjadi Kewenangan Provinsi		80.000.000
59	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	80.000.000
III	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Meliputi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Kereta Api Khusus		63.197.173
60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perlintasan Bertanda Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perlintasan Bertanda Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	63.197.173

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan Dinas Perhubungan yang tertuang dalam perjanjian kinerja beserta nilai targetnya adalah sebagai berikut :

TABEL 2.6 PERJANJIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1 Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,690
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2 Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	Pelabuhan	2
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3 Jumlah Terminal Tipe B	Terminal	7
		4 Load Factor Penumpang Kereta Api	%	80
		5 Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9
		6 Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	70
		7 Load Factor Angkutan Barang Darat	%	69
		8 Load Factor Angkutan Barang Laut	%	55
		9 Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	54
		10 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	69,10
		11 On Time Performance Layanan Transportasi	%	57,80
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12 V/C Rasio Jalan Provinsi	Rasio	0,392

Selain target pencapaian indicator sasaran, pada perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan juga memuat program – program yang dilaksanakan. Adapun Program yang dilaksanakan pada APBD 2024 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	42.705.501.005	APBD dan DAK
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.776.848.190	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	2.821.742.200	APBD
4	Program Perkeretaapian	223.197.173	APBD

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024**

**BAB III
PENGUKURAN KINERJA**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Sebagai informasi tambahan Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan meliputi pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahunan.

Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran strategis berikut indikator

kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada Tahun 2024 ini.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah meru pakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran strategis Instansi Pemerintah. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sesaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja.

Dari 4 Sasaran Stretegis ditetapkan 12 Indikator Kinerja sasaran sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

3.2.1 Rasio Konektivitas Transportasi

Rasio Konektivitas Provinsi berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020.
Rasio Konektivitas Provinsi = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan).

1. IK1 (Angkutan Jalan)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek}}{\text{Jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut}} \\ &= \frac{28 \times 1}{47} \\ &= \frac{28}{47} \\ &= 0,59 \end{aligned}$$

2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi tdk x bobot lintas}}{\text{Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut}} \\
 &= \frac{24 \times 1}{36} \\
 &= \frac{24}{36} \\
 &= 0,722
 \end{aligned}$$

Konektivitas Transportasi Darat 0,59, Bobot Konektivitas Transportasi 70%, Konektivitas Transportasi Laut 0,722, Bobot Konektivitas Transportasi 30%.

$$KTPROV = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$$

$$KTPROV = (0,59 \times 0,70) + (0,722 \times 0,30)$$

$$KTPROV = 0,413 + 0,216$$

$$KTPROV = 0,629$$

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
1	Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi	Rasio	0,690	0,629	91

Dari Realisasi capaian Rasio Konektivitas Transportasi Provinsi pada Tahun 2024 sebesar 0,690 Rasio dimana target sebelumnya 0,681 Rasio, Rasio Konektivitas Transportasi capaian 2024 mencapai 91% dari nilai target yang ditentukan. Penyebab tidak tercapainya Rasio Konektivitas yaitu masih banyaknya jumlah kebutuhan trayek di jalan provinsi yang belum terlayani dan Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan yang belum terlayani sedangkan Fasilitas Integrasi Baik Fisik maupun Non Fisik Membutuhkan Biaya yang tinggi.

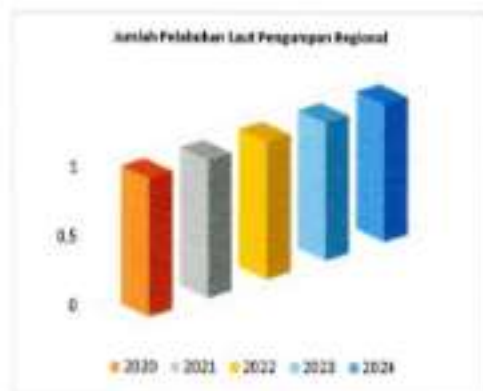
3.2.2 Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpukan Regional



Gambar 3.1 Target dan Realisasi Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpukan Regional Tahun 2024

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpukan Regional Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
2	Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpukan Regional	pelabuhan	2	1	50,0



Gambar 3.2 Perbandingan Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpukan Regional Tahun 2020 - 2024

Tabel 3.4 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pelabuhan Laut Pengumpan Regional

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	pelabuhan	1	1	100%	2	1	50%

Adapun capaian Indikator Kinerja tersebut Untuk jumlah pelabuhan laut pengumpan regional yang ada pada tahun 2020 sampai tahun 2024 ini masih sama yaitu berjumlah 1 pelabuhan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api – Api. Realisasi tidak mencapai target karena Kurangnya regulasi terkait Pelabuhan pengumpan regional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jasa terkait Pelabuhan Pengumpan Regional dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

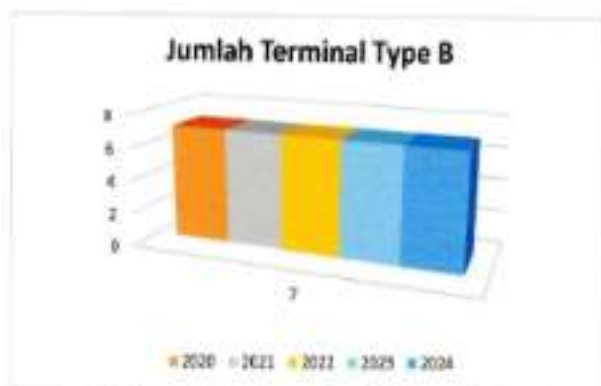
3.2.3 Jumlah Terminal type B



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Jumlah Terminal Tipe B Tahun 2024

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Jumlah Terminal Tipe B Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	2	4	5	6
2	Jumlah Terminal Tipe B	terminal	7	7	100



Gambar 3.4 Perbandingan Jumlah Terminal Tipe B Tahun 2020 - 2024

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Terminal Tipe B

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Terminal Type B	terminal	7	7	7	7

Adapun capaian Indikator Kinerja pada Tahun 2020 – 2024 masih sama yaitu berjumlah 7 terminal antara lain :

1. Terminal Jakabaring
2. Terminal Petanang
3. Terminal km 32 Indralaya
4. Terminal Randik
5. Terminal Kota Baru
6. Terminal Lubuk Harjo
7. Terminal Muara Dua

Dimana Faktor Penghambat Bus AKAP/AKDP belum seluruhnya memasuki terminal dan Faktor Pendorong yaitu On Site Activity, terminal bayangan.

3.2.4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :



Gambar 3.5 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Survey Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, dalam memberikan pelayanan pada masyarakat pengguna pelayanan transportasi dan sekaligus sebagai wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan pelayanan.

Adapun capaian Indikator Kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I 86,41 Indeks
- Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan II 86,99 Indeks
- Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan III 86,52 Indeks
- Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan IV 84,28 Indeks

Persentase rata-rata capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi Darat, Laut, dan Kereta Api (CIKM).

$$DKM = \frac{86,41 + 86,99 + 86,52 + 84,28}{4}$$

$$DKM = 86,09 \text{ Indeks}$$

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

NO.	INDEKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,10	86,09	124

Dimana penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Survei Kepuasan masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Adapun nilai DKM Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 diperoleh angka 124%. Untuk mengetahui nilai persepsi, nilai interval DKM, Nilai Interval Konversi DKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman pada Keputusan Menpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 3.8 Standar Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 1,75	2,5 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi IKM) adalah 86,09 Indeks apabila kita lihat tabel tersebut diatas maka dapat dikatakan Kinerja Unit Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah "Sangat Baik".

3.2.5 On Time Performance Layanan Transportasi



Gambar 3.6 On Time Performance Tahun 2024

Adapun capaian Indikator Kinerja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- On Time Performance Sungai Danau Penyeberangan 66 %
- On Time Performance Laut 66 %
- On Time Performance Kereta Api dan LRT 100 %
- On Time Performance Perkotaan Berbasis Jalan 66 %

Persentase capaian rata-rata On Time Performance terhadap Layanan SDP, Laut, dan Darat (COTP).

$$COTP = \frac{66\% + 66\% + 100\% + 66\%}{4}$$

$$COTP = 75\%$$

Tabel 3.9 Capaian Kinerja On Time Performance Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
5	On Time Performance	%	57,80	75	129

Target Kinerja On Time Performance yang ditetapkan sebesar 57,80% sedangkan realisasi sebesar 75% ini menggambarkan capaian Kinerja OTP 129% hal ini melebihi target yang telah ditetapkan karena kinerja layanan yang meningkat.

3.2.6 Load Factor Penumpang Kereta api



Gambar 3.7 Load Factor Penumpang Kereta Api dan LRT Tahun 2024

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kereta Api Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2	2	3	4	5	6
6	Load Factor Penumpang Kereta api dan LRT	%	80	75	93,75

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kereta Api

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Target	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Kereta Api	%	48	65	80	75

Untuk Load Factor Penumpang Kereta Api dan LRT Capaian Realisasi nya mencapai 75% dari nilai target yang ditetapkan sebesar 80%. Dimana Load Factor Penumpang Kereta Api sebesar 112% dan LRT sebesar 38 % didapat untuk Total Load Factor Kereta api dan LRT sebesar 75%. Realisasi Tahun 2024 meningkat dari tahun 2023 sebesar 65 %.

Adapun Faktor Pendorongnya adalah tarif yang relatif murah dibandingkan dengan moda angkutan darat, adanya inovasi pembayaran digital dengan KUE dan QRIS serta tersedianya kemudahan angkutan pengumpan LRT.

3.2.7 Load Factor penumpang Kapal Laut



Gambar 3.8 Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2024

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Kapal Laut Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3	2	3	4	5	6
7	Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	9	20	222,22

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Kapal Laut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Kapal Laut	%	45	42	9	20

Untuk Load Factor Penumpang Kapal Laut Capaian Realisasi nya mencapai 222,22% adapun target yang ditetapkan sebesar 9% dan capaian realisasi 20%.

Faktor pendorong yaitu Kenyamanan, kemudahan dan Keamanan Angkutan Penyeberangan setelah adanya peningkatan fasilitas pelabuhan seperti mudah mendapatkan informasi keberangkatan kapal dan sistem pembayaran secara online (QRis)

Faktor penghambat yaitu Penumpang angkutan kapal penyeberangan dihitung bersama kendaraan yang dikendarai/ditumpangi sehingga kapasitas tempat duduk yang tersedia di atas kapal tidak terpeka secara maksimal

3.2.8 Load Factor penumpang Bus AKDP



Gambar 3.9 Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2024

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	
8	Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	70	64	91,43

Tabel 3.15 Target dan Realisasi Load Factor Penumpang Bus AKDP

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Penumpang Bus AKDP	%	69	50,65	70	64

Load Factor Penumpang Bus AKDP Tahun 2024 Capaiannya 91,43 % dengan Target 70 % sedangkan capaiannya realisasinya 91,43% untuk Tahun 2024 hal ini disebabkan menurunnya peminat yang menggunakan angkutan umum. Perbandingan dengan tahun 2023 capaian tahun ini meningkat dimana tahun 2023 realisasi sebesar 50,65% dan pada Tahun 2024 menjadi 64% meningkat 1,35%.

Namun tidak tercapainya target karena meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi dan kendaraan online membuat masyarakat lebih memilih menggunakan mobil pribadi dan kendaraan online untuk berpergian.

3.2.9 Load Factor Angkutan Barang Darat



Gambar 3.10 Load Factor Angkutan Barang Darat Tahun 2024

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Load Factor Angkutan Barang Darat Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
9	Load Factor Angkutan Barang Darat	%	69	63	91,30

Tabel 3.17 Target dan Realisasi Load Factor Angkutan Barang Darat

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Barang Angkutan Darat	%	68	62,05	69	63

Load Factor Angkutan Barang Darat Tahun 2024 Capaiannya 91,30% dengan Target 69% sedangkan capaiannya realisasinya 63 % untuk Tahun 2024. Angkutan Barang Darat mengalami kenaikan sebesar 0,5% dari Tahun 2023 ke Tahun 2024.

Beberapa factor yang mempengaruhi yaitu Permintaan terhadap angkutan barang seringkali fluktuatif, terutama pada musim- musim tertentu seperti menjelang hari raya atau saat panen.

3.2.10 Load Factor Angkutan Barang Laut



Gambar 3.11 Load Factor Angkutan Barang Laut Tahun 2024

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Load Factor Angkutan Barang Laut Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
10	Load Factor Angkutan Barang Laut	%	55	62,35	113,36

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Load Factor Angkutan Barang Laut

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Barang Angkutan Laut	%	54	54	55	62,35

Load Factor Angkutan Barang Laut Tahun 2024 Capaiannya 113,36% dengan Target 55% dimana capaiannya realisasinya yaitu 62,35% untuk Tahun 2024. Angkutan Barang Laut mengalami peningkatan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 sebesar 8,35%.

Adapun Faktor Pendorong yaitu Kebutuhan Perusahaan dalam distribusi barang dan Produknya. Faktor Penghambat, Sistem Kontrak Pengangkutan Barang yang bukan berdasarkan jumlah muatan tetapi berdasarkan jumlah peti kemas

3.2.11 Load Factor Angkutan Barang Kereta Api



Gambar 3.12 Load Faktor Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2024

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Load Factor Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN TAHUN 2024			
		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
10	Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	54	94,62	175,32

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Load Factor Angkutan Barang Kereta Api

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Load Factor Angkutan Barang Kereta Api	%	53	106	54	94,62

Load Factor Angkutan Barang Kereta Api Tahun 2024 sebesar 94,62% dengan Target 54% dan capaian realisasinya 175,32%. Hal ini disebabkan meningkatnya Angkutan Barang menggunakan Kereta Api, persentase peningkatan dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 yaitu 20%.

Adapun Faktor pendorong kereta dijadikan moda utama untuk mengangkut komoditas hasil bumi dan kurang tegasnya kebijakan pemerintah untuk membatasi truk angkutan barang.

3.2.12 V/C Ratio Jalan Provinsi

NO	NOMOR RIBAB JALAN		NAMA RIBAB JALAN		Volum (SMPP/JAM)	Kapasitas (SMPP/JAM)	V/C Ratio	Level Of Service (LOS)
1	1	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG (PALEMBANG)		1.162.588	2.834,00	0,410	B
2	1	K	JLN. MEUREKA (PALEMBANG)		1.640,67	3.643,00	0,450	B
3	1	K	JLN. KOLATMO (PALEMBANG)		2.945,400	3.881,00	0,759	B
4	1	K	JLN. BIRUJEN, JML. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)		1.570,650	2.652,00	0,592	C
5	1	K	JLN. KOL. AHMAD BADAUDUDIN - JLN. LETKOL SIRKANDAR (PALEMBANG)		1.709,750	2.940,50	0,581	C
6	1	K	JLN. PSW. SEJIKTI (PALEMBANG)		2.253,780	3.431,00	0,658	C
7	1	K	JLN. DIPENEGGIRI (PALEMBANG)		1.478,990	2.842,00	0,520	C
8	1	K	JLN. KAPTER A. RIVAI (PALEMBANG)		2.134,53	3.324,00	0,648	C
9	1	K	JLN. WALIKOTA II, TUSINT (PALEMBANG)		1.776,870	3.258,00	0,542	B
10	1	K	JLN. JAKSA AGUNG II, BOPKAPTO (PALEMBANG)		2.387,800	3.000,00	0,795	D
11	1	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)		1.758,85	2.492,00	0,706	C
12	1	K	JLN. ARJANTAR 45 (PALEMBANG)		1.889,560	2.940,50	0,643	C
13	1	K	JLN. SULTAN M. MANSTUR (PALEMBANG)		1.546,060	2.200,00	0,675	C
14	1	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)		1.274,040	3.322,00	0,384	B
15	1	K	JLN. ARDI CUK AGUS (PALEMBANG)		1.815,340	3.000,00	0,605	C
16	1	K	JLN. PANGIRAN RATO - PASAR BUKIT - SP. JL. PENGEDIKAN (PALEMBANG)		1.569,780	2.940,50	0,534	C
17	1	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)		1.489,660	2.940,50	0,507	C
18	1	K	JLN. MP. MANORUNEGARA (PALEMBANG)		2.589,500	3.107,50	0,810	D

19	1	19	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	2.376.150	3.013,00	0,789	D
20	1	20	K	JLN. PANGRAN ATIN (KOTA PALEMBANG) - IRTS. BANYUASIN	1.217.430	2.090,00	0,453	B
21	1	21	K	JL. PERDEKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	804.800	2.240,00	0,351	B
22	1	22	K	JLN. KAPT. AEDULAH - JLN. MOHANI KADIR	1.582.870	3.048,00	0,519	C
23	1	23	K	JLN. LETTU KASIM KADIR (CANDURE) - IRTS. KAR. BANYUASIN	1.144.740	2.490,00	0,460	B
24	1	24	K	JLN. NOERDIN PARTIJI (PALEMBANG)	1.950.750	3.196,00	0,613	C
25	1	25	K	IRTS. KOTA PALEMBANG - KENTEN LAUT (BANYUASIN)	1.156.430	2.530,00	0,457	C
26	1	26	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	1.062.820	2.346,97	0,453	C
27	1	27	K	JLN. TAQWA MATA MERAI (PALEMBANG) - MERAI MATA (IRTS. BANYUASIN)	908.450	2.490,00	0,373	B
28	1	28	K	JLN. ADE SULISTO - IRTS. KAR. BANYUASIN (PALEMBANG)	1.403.660	2.690,00	0,522	C
29	2			IRTS. KOTA PALEMBANG - BUKAJADI (BANYUASIN)	1.075.620	2.690,00	0,392	B
30	3			IRTS. KOTA PALEMBANG - SIKOMORO (BANYUASIN)	1.022.370	2.690,00	0,380	B
31	4			PLAJU - SP. BUNGAL PINANG - IRTS. KAR. OKI	1.000.540	2.690,00	0,375	B
32	5			JLN. KTM RAMBUTAN - SP. LOROK	797.820	2.290,00	0,348	B
33	6			SP. OPT - PADATAN SAUDAGAR - SELAUO	826.660	2.750,00	0,301	B
34	7			JLN. AKSES MERUJU KEDUN RAYA BROWLAYA - SP. LOROK	567.380	1.750,00	0,316	B
35	8			IRTS. KAR. BANYUASIN - CEBIKAI (KAYU AGUNG)	1.007.930	2.697,00	0,374	B
36	9			SP. MERAPIAT - IRTS. KAR. MUARA ENIM	570.730	1.650,00	0,346	B
37	10			IRTS. KAR. MUARA ENIM - PAYAHAMAN	592.630	2.150,00	0,276	A
38	11			TANJUNG RAJA - SP. TAMBARO RAMBANG	855.430	2.797,00	0,306	B
39	12			SP. PENYANDANGAN - IRTS. KAR. ORUT	554.000	1.537,39	0,361	B
40	13			JLN. AKSES TPI SURGANO (BANYUASIN)	670.850	2.484,00	0,273	A

41	14		TRANS SP. 1 - SP. TAHARI AHANG	671,240	2.547,00	0,261	A
42	15		CUMPAKA - TRANS SP. 1	1.005,240	2.436,50	0,413	B
43	16		SP. TAMBAK RAMBANG - BTS. KAH. OKU	643,890	2.797,00	0,230	A
44	17		LUTUK REBERUR - SUMBU SARI - MATARAM JAYA	427,460	1.664,26	0,257	A
45	18		BTS. KAH. OKU - SP. KESPUH	487,860	1.664,26	0,293	B
46	19		BTS. KAH. OKAN ILIR - PERENCANAAN (SP. DATUMARTA UNIT XII)	327,450	1.664,26	0,194	A
47	20		BEKAYU - BTS. KAH. PALI	1.634,440	2.679,95	0,382	B
48	21		LELUNG - PETANOGAN	471,640	1.664,26	0,283	B
49	22		DARUK REJO - BTS. KAH. OKUT	438,330	1.664,26	0,280	A
50	23		PETANOGAN - T.J. KUMUNING - BTS. KAH. OKI	448,780	1.764,26	0,254	A
51	24		GUMAWANG - BASUAN (SP. KEPUR)	573,230	1.664,26	0,314	B
52	25		PERENCANAAN (SP. DATUMARTA UNIT XII) - SP. LUTUK BATAK	419,870	1.764,26	0,238	A
53	26		GUMAWANG - PETANOGAN	490,560	1.288,88	0,381	B
54	27		SP. KESPUH - KURUNGAN NYAWA	542,410	1.504,63	0,560	B
55	28		KURUNGAN NYAWA - GUMAWANG	446,280	1.335,00	0,314	B
56	29		KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	786,000	2.454,00	0,325	B
57	30		MARTAPURA - SP. MARTAPURA	735,410	2.127,30	0,346	B
58	31		SP. BUKAJU (DATURAJA) - SP. LENGKITI	973,540	2.427,30	0,401	B
59	32		SP. LENGKITI - SP. MARTAPURA	743,600	2.167,87	0,351	B
60	33		SP. MARTAPURA - MUARA DUA	821,780	2.327,30	0,353	B
61	34		MUARA DUA - SP. HAJI	528,490	2.084,17	0,266	A
62	35		SP. HAJI - SP. CAMPANG	515,820	2.064,70	0,250	A
63	36		SP. CAMPANG - SP. MUARA SINDANG	324,420	1.664,26	0,195	A
64	37		SP. MUARA SINDANG - BTS. PROV. BENGKULU	305,760	1.457,76	0,210	A

65	38		MUARA DUA - RP. BENDER	291,320	1,464,26	0,235	A
66	39		SP. BENDER - BTS. PROV. LAMPUNG	515,320	1,764,26	0,292	B
67	40		LEMPAK - BTS. KAR. OGAN ILIR	356,420	1,664,26	0,214	A
68	41		LEMPAK - MODORO (BTS. KAR. MUARA ENIM)	371,320	1,564,26	0,238	A
69	42		BTS. KAR. OGAN ILIR - BERINGEN	320,780	1,335,00	0,240	A
70	43		SP. RAJA - MODORO (BTS. KAR. MUARA ENIM)	795,620	2,742,00	0,290	B
71	44		SP. AIR ITAM - SP. TALANG BULANG	1,279,670	1,664,26	0,769	C
72	45		BTS. KAR. MUARA ENIM - SP. AIR ITAM	476,310	2,453,00	0,194	A
73	46		JLN. SP. BELIMING - PUNDORO (PALI)	574,940	2,742,00	0,210	A
74	47		SP. LIMA PUNDORO (KAR. PALI) - BTS. KAR. MUARA	785,320	2,767,00	0,284	B
75	48		SP. 9 DANGUN JAYA - SP. KULUM (BTS. PALI)	755,320	2,679,95	0,282	B
76	49		SP. SUGIHWAPAS - BTS. KAR. LAHAT	586,720	2,538,90	0,232	A
77	50		SP. SUGAMBARO - SP. 9 DANGUN JAYA (MUHURAWAS)	478,720	2,111,75	0,227	A
78	51		BTS. KAR. MUARA ENIM - SP. AIR DINGIN	925,280	2,244,60	0,412	B
79	52		MUARA SEMAN - SP. EMBACANG	787,560	2,648,10	0,297	B
80	53		KEDAN AGUNG - SP. T.J. ARO (PAGARALAM)	721,560	2,427,00	0,297	B
81	54		T.J. CEMEN - PERANTONAN (PAGARALAM)	671,560	2,111,75	0,318	B
82	55		TEBING TINGGI - PUNDORO (EMPAT LAWANG)	640,530	2,261,75	0,283	B
83	56	K	JLN. PANDAYARI (KOTA LUBER LINGGAU) - TUGUMULYO (KAR. MUARA RAWAS)	986,280	2,261,75	0,436	B
84	57		TEBING TINGGI - TANJUNG RAYA	1,061,320	2,461,73	0,431	B
85	58		RP. PERERUK - TUGUMULYO - TERAWAS	335,810	1,925,10	0,169	A
86	59		PAGARALAM - TANJUNG RAYA	1,076,290	1,925,10	0,559	C
87	60		TERAWAS - TABATINGGIH - MAUR	1,261,900	2,513,50	0,503	C
88	61		TANJUNG RAYA - BTS. PROV. BERGULU	884,050	2,538,900	0,348	B
Rata-rata V/C Ratio							0,390

3.3 CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

3.3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Dari 4 Sasaran Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan terdapat 12 Indikator Kinerja sasaran yang sudah dijelaskan pada beberapa poin diatas sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi tahun 2024. Analisis capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,690	0,629	91
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	2	1	50
		3. Jumlah Terminal Tipe B	7	7	100
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,10	86,09	124
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	57,80	75	129
		6. Load factor penumpang kereta api	80	75	93,75
		7. Load factor penumpang kapal laut	9	20	222,22
		8. Load factor penumpang Bus AKDP	70	64	91,43
		9. Load factor angkutan barang darat	69	63	91,30
		10. Load factor	55	62,35	113,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		angkutan barang laut			
		11. Load factor angkutan barang kereta api	54	94,62	175,32
4	Menurunnya Kejenuhan Arus Laku Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,392	0,390	100,51

Dari tabel diatas diketahui bahwa Tingkat Ketercapaian Kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan dalam urusan Perhubungan dan Urusan Penunjang masuk katagori sangat baik.

3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2024

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020	
				Target	Realisasi
1	Terwujudnya Keberhasilan Arah Kebijakan Angkutan	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi	1. Jumlah Trip Perplanan Kapal	3.702	4.543
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelatukan Laut Pengumpan Regional	1	1
			3. Jumlah Terminal Tipe B	8	7
			4. Jumlah Arah Perumpang Kencana Api	2.232.658	1.053.637
			5. Jumlah Arah Perumpang Kapal Laut	68.648	19.538
3		Memertemukan Kesuksesan Angkutan	6. Jumlah Arah Perumpang Bus Adu	1.776.105	804.236
			7. Load Faktor Angkutan Darat	60	51
			8. Load Faktor Angkutan Laut	49	39
			9. Load Faktor Angkutan Kencana Api	45	10
4		Memertemukan Keberhasilan Arah Kebijakan Angkutan	10. Persentase Memerutnya Angkutan Kesuksesan Laut Linas	8	10
			11. Persentase Tingkat Profitabilitas	5	6
					120

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2021 - 2022

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021			2022			
				TARGET	Realisasi	Capaian (%)	TARGET	Realisasi	Capaian (%)	
1	Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Efektivitas Transportasi	1. Rasio Kecepatan Transportasi	0,6	0,6	100	0,62	0,51	82,26	
2		Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Perbaikan Laut Perhubungan Regional	1	1	100	1	1	100	
3		Kemudahan Ketersediaan Angkutan	Meningkatnya Angkutan	3. Jumlah Terminal Tipe B	8	7	87,5	7	7	100
				4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	63	63	100	52,75	51,97	98,52
				5. On Time Performance Layanan Transportasi	51	51	100	55	64	108,46
				6. Load faktor penumpang kereta api	48	42	87,5	45	44	97,78
				7. Load faktor penumpang kapal laut	42	42	100	43	44	102,23
				8. Load faktor penumpang bus AC/PS	65	62	95,4	67	66	98,51
				9. Load faktor angkutan barang darat	62	63	104,8	66	65	98,48
				10. Load faktor angkutan barang laut	51	57	111,8	52	52	100
				11. Load faktor angkutan barang kereta api	47	81	172,3	48	49	100
				12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,318	0,310	102,6	0,304	0,28	85,53
4			Meningkatnya Kepuasan Angkutan Lokal							

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja 2023 – 2024

No	Tipe/Jan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	Meningkatnya Efektifitas Kinerja Angkutan	1. Rasio Konfirmasi Transportasi	0,681	0,000	89	0,690	0,629	91
2		Meningkatnya Efisiensi Biaya Transportasi	2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Pengawasan Regional	1	1	100,00	2	1	100,00
3		Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3. Jumlah Terminal Tipe B	7	7	100,00	7	7	100,00
			4. Indeks Kualitas Pelayanan (IKAP)	66,92	85,81	124	69,18	86,08	124
			5. On Time Performance Layarasi Transportasi	52,75	71	118	57,00	79	118
			6. Load factor penumpang kereta api	48	65	135	60	75	135
			7. Load factor penumpang kapal laut	45	42	93,33	9	20	222,22
			8. Load factor penumpang bus antar	69	90,60	73,33	70	64	91,43
			9. Load factor angkutan barang darat	68	62,09	91,25	69	63	91,30
			10. Load factor angkutan barang laut	94	94	100	95	62,35	113,30
			11. Load factor angkutan barang kereta api	53	106	200	54	94,62	175,32
			12. V/C Ratio Jalan Persegi	0,301	0,320	88	0,302	0,360	100,51
4		Meningkatnya Kepuasan Arus Lalu Lintas							

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya baik dalam urusan Pemerintah Bidang Perhubungan dan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Untuk capaian kinerja pertahunnya selama 5 (tiga) tahun selalu tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$ namun ada salah satu indikator yang dibawah 100 % dikarenakan salah menentukan target.

Dari tabel perbandingan antara Tahun 2019 dan 2021, dapat dijelaskan yaitu adanya perbedaan indikator pada tahun 2021 sebanyak 6 indikator kinerja sasaran menjadi 5 indikator kinerja sasaran pada tahun 2022 hal ini disebabkan perubahan renstra, namun masih ada indikator kinerja sasaran yang sama dan untuk capaian indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel diatas.

Untuk mengetahui tingkat Capaian Kinerja Terhadap Dokumen Perencanaan Strategis sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Terhadap Rencana Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2024	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,619	0,686	91
2	Meningkatnya simpul transportasi	2. Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional	1	2	50,00
		3. Jumlah Terminal Tipe B	7	7	100,00
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,09	89,10	124
3	Keseimbangan kebutuhan angkutan	5. On Time Performance Layanan Transportasi	75	57,86	129
		6. Load factor penumpang kereta api	75	80	93,75
		7. Load factor penumpang kapal laut	20	9	222,22
		8. Load factor penumpang Bus AKDP	64	70	91,43
		9. Load factor angkutan barang darat	63	69	91,30
		10. Load factor angkutan barang laut	62,35	55	113,36
		11. Load factor angkutan barang kereta api	94,62	54	175,32
		12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,390	0,392	99,48

Dari tabel diatas dapat dilihat target masing – masing indikator kinerja sasaran setiap tahunnya beserta realisasinya pada tahun 2024, dimana target terpenuhi pada masing – masing indikator namun ada target yang tidak terpenuhi dikarenakan beberapa faktor penghambat diantaranya kurangnya regulasi terkait Pelabuhan pengumpan regional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengguna jasa terkait Pelabuhan Pengumpan Regional dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan target akhir renstra dapat dilihat capaian target yang semakin meningkat dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2024 tercapai sepenuhnya.

3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kementerian Perhubungan

Sumber Data terkait tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran Kementerian Perhubungan diperoleh dari Peraturan Menteri Perhubungan No PM 80 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020 – 2024, sedangkan untuk data target dan realisasi Kementerian Perhubungan diperoleh dari website http://eperformance.dephub.go.id/index.php/public/capaian_kementerian. Untuk Tahun 2024 Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini,

Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Kementerian Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan				Kementerian Perhubungan					
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
1	Meningkatnya Kontribusi Transportasi	1. Rasio konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	0,761	0,629	1	Tinggainya Kontribusi Nasional	1. Rasio konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	0,761	0,57
2	Meningkatnya Simulasi Transportasi	2. Jumlah Pelatiran Laut Pengiriman Regional	2	1	2	Meningkatnya Koordinasi Transportasi	2. Persentase Capaian Rata-rata On Time Performance	79,00	62,8
3	Kesejahteraan Masyarakat Angkutan	3. Jumlah Terminal Tipe B	7	7	3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Transportasi	88,5	68,62
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	69,10	60,09					
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	17,80	7%					
		6. Load factor penumpang level 2a	60	75					
		7. Load factor penumpang level 1a	9	20					
		8. Load factor penumpang Bus AKOR	70	64					
		9. Load factor angkutan barang darat	69	63					
		10. Load factor angkutan barang laut	55	62,35					
		11. Load factor angkutan barang darat RT	54	64,62					
		12. V/C Ratio Jalan Perseid	0,392	0,390					
4	Meningkatnya Kepuasan Arus Lalu Lintas								

Dari tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Terkait Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yaitu terwujudnya Konektivitas Nasional dimana rasio konektivitas merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Sasaran Strategis yaitu meningkatnya Konektivitas Transportasi dimana indikator kinerjanya Rasio Konektivitas transportasi merupakan Indikator Kinerja Tujuan, dimana untuk mengukur tercapainya indikator kinerja tujuan tersebut terdapat indikator kinerja sasaran yaitu jumlah trayek yang di akses dan jumlah penumpang berangkat angkutan umum. Setelah dilakukan penghitungan Rasio Konektivitas Provinsi yaitu 0,629 atau 68,2 % wilayah Sumatera Selatan sudah terlayani oleh moda Transportasi baik darat, sungai dan penyeberangan.

2. Terkait Persentase Capaian Rata – rata On Time Performance

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya keselamatan transportasi dimana indikator kinerjanya Persentase Capaian Rata – rata On Time Performance, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Sasaran Strategisnya Keseimbangan Kebutuhan Angkutan. Setelah dilakukan penghitungan On Time Performance yaitu 75%.

3. Terkait Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi, Kementerian Perhubungan lebih berfokus kepada meningkatkan keselamatan dan menurunkan angka kecelakaan sehingga indikator kinerja sasarannya yaitu Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta Keberangkatan, sedangkan untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam indikator kinerja sasarannya V/C Rasio di jalan Provinsi, dengan harapan setelah melakukan beberapa upaya terkait

keselamatan dan keamanan transportasi dapat meningkatkan kinerja lalu lintas di jalan Provinsi.

4. Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa diantara indikator yang ada pada Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah searas, dimana masing – masing indikator di Dinas Perhubungan Provinsi secara prinsip turut berkontribusi dalam pencapaian kinerja Kementerian (Pusat).

3.3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.28 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Efektivitas Transportasi	1. Rasio Efektivitas Transportasi	0,600	0,620	94	Belum tercapainya jaringan transportasi darat, sungai, danau penyeberangan dan laut serta pemanfaatan pada wilayah Sumatera Selatan dikarenakan wilayah yang cukup luas dan terdapat.	Perlu adanya koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Selatan guna meningkatkan Rasio Efektivitas Transportasi Provinsi Sumatera Selatan
2	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah Pelatukan Laut Pengumpan Regional	2	1	50,00	Kurangnya regulasi terkait kebutuhan pengumpan regional, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengumpan jasa terkait kebutuhan Pengumpan Regional dan Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan Fasilitas umum pelayanan, keamanan berlayar, perlu adanya koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk peningkatan Fasilitas Umum di Pelabuhan TAA
		3. Jumlah Terminal Tipe B	7	7	100,00	Belum optimalnya pelayanan dan pengawasan serta sarana dan prasarana di 7 Terminal Tipe B kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan	Perlu adanya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Terminal dan peningkatan SPM di Terminal Tipe B di Sumatera Selatan

3	Keseluruhan Kabupaten Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	68,10	85,09	1,24	Pemilaian terhadap pelayanan publik diukur melalui indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan barang dan jasa publik serta administratif, sehingga dapat memberikan gambaran level penyelenggaraan organisasi dari sektor pelayanan publik khususnya layanan transportasi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Perlu adanya pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital dan adanya uji layanan pengujian secara online 24 jam guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam menggunakan layanan transportasi
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	57,80	75	1,29	Pembiayaan bagi operator dan pengawasan bagi operator layanan transportasi sangat diperlukan	Perlu adanya pembinaan bagi operator, pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi dan pemasangan reward dan punishment bagi operator layanan transportasi
		6. Load faktor penumpang kereta api	80	75	93,75	Penggunaan kereta sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah sangat menarik bagi pengguna jasa transportasi	Perlu menyediakan fasilitas integrasi layanan angkutan lanjutan dan dan menuju stasiun
		7. Load faktor penumpang kapal laut	9	20	222,22	Adanya fasilitas integrasi layanan angkutan dan dan menuju pelabuhan yaitu berupa operator dan dan travel	Menyediakan fasilitas integrasi layanan angkutan lanjutan dan dan menuju pelabuhan
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	70	64	91,43	Belum adanya kesadaran masyarakat terkait penggunaan angkutan umum khususnya layanan Bus AKDP	Perlu memperbaiki kinerja layanan dan memfasilitasi Bus AKDP

	9. Load faktor angkutan barang dasar	69	63	91,30	Belum adanya pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL)	Perlu pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL) secara rutin
	10. Load faktor angkutan barang laut	55	62,35	113,36	Melakukan pengurusan Dana Abolisi Khusus (DAK) untuk melakukan pembangunan Areal Parkir, penambatan ruas jalan Areal Pelabuhan & Fasilitas Umum (Magas, Balai Kesehatan & Mass Program) serta pemeliharaan bangunan yang telah ada pada Pelabuhan Tanjung Api-Api	Adanya pemeliharaan jalur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal
	11. Load faktor angkutan barang kereta api	54	94,62	175,32	Adanya perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkutan	Adanya perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkutan
4	Menurunnya Kejenuhan Anus Lulu Lintas	0,392	0,390	99,48	Adanya Pengawasan dan pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Menetapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang	Melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan Menetapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang

3.3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Perhubungan yg telah dilakukan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 bisa terlihat pada Tabel 3.29 sebagaimana berikut :

Tabel 3.29 Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan Program dan Kegiatan

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Memanjang/ Tidak Memanjang
Meningkatnya Efektivitas Transportasi	1. Rasio Efektivitas Transportasi	0,629 Rasio	Program Peningkatan Urusan Pemerintahan Daerah	Pembinaan peningkatan pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Memanjang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ULLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Memanjang
			1. Penyediaan Perkeretaapian Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perkeretaapian Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2 Poin	Memanjang
				Jumlah TSK Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 TSK	Memanjang

Mengukur Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan Laut Pengangkutan Regional	1 Pelabuhan	3. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	1 Unit	Meninggi
			Program Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.373 Trip	Meninggi
			1. Peningkatan, Penelitian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengangkutan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengangkutan Regional	1 Pelabuhan	Meninggi
			Program Penunjang Utama Kawasan Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah Daerah provinsi	100%	Meninggi
			Program Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.373 Trip	Meninggi
Mengukur Efisiensi Transportasi	3. Jumlah terminal type B	7 Terminal	1. Peningkatan, Penelitian Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengangkutan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengangkutan Regional	1 Pelabuhan	Meninggi
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kegiatan kendaraan transportasi per 1 juta kependudukan	12,49	Meninggi

				1. Pengelaksanaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dikelemba	7 Terminal	Memunjang
				2. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU	1 Laporan	Memunjang
Kembangan Kebudayaan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,09	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Memunjang
	5. On Time Performance Layanan Transportasi			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Memunjang
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Memunjang
				1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU	1 Laporan	Memunjang

6. Load factor penumpang kereta api	75%	Program Perkeretaapian		Jumlah Penumpang Keretaapi	4.948.466 Orang	Menumpang
		1. Perencanaan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Meliputi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Perjang Jaringan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan provinsi	24 km	Menumpang
		2. Perencanaan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		Perjang Jaringan Perkeretaapian yang menjadi kewenangan provinsi	24 km	Menumpang
		Program Pengalokasian Pelayanan		Jumlah Trip Perjalan Kapal	3.373 Trip	Menumpang
7. Load factor penumpang kapal laut	20%	1. Perencanaan Lini Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan		Jumlah Lini Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	Menumpang
		2. Perencanaan dan Perencanaan Lini Perhubungan Sungai dan Danau yang Meliputi Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Pembangunan Perhubungan Sungai dan Danau	1 Perhubungan	Menumpang
8. Load factor penumpang bus AKOP	50%	Program Penyelenggaraan Lini Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Rasio kecepatan kendaraan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,40 Rasio	Menumpang

			1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAU	1 Laporan	Menunjang
				Jumlah Izin Trayek yang dikeluarkan	25 Trayek	Menunjang
		9. Load faktor angkutan barang darat	2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAU)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Menunjang
		10. Load faktor angkutan barang laut	1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik	Menunjang
			Program Pengalokasian Pelebaran	Jumlah Trip Perjalanan Kapal	3.373 Trip	Menunjang
			1. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan	13 Izin	Menunjang

	11. Load Faktor angkutan barang koreksi opk	94,62%	Program Perkeretaapian	Jumlah Pemungup Keretaapi	4.948.466 Orang	Mempung
			1. Penertiban Izin Pengisian atau Pembebasan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Pongtapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Merobles 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Izin Keretaapi Khusus	2 Dokumen	Mempung
			Program Pemungup Urusan Pemerintahan Daerah	Pemertaaan monevnya pobyaman urusan pemerintah daerah provinsi	100%	Mempung
Mempunnya Raganhuar Atas Laku Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	0,390 Baso	Program Penyelenggaraan Laku Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	12,49 Rasio	Mempung
			1. Pelaksanaan Mandjemen dan Rekayasa Laku Lintas untuk Jamsig Jalan Provinsi	Jumlah Tlok Pelaksanaan Mandjemen dan Rekayasa Laku Lintas untuk Jamsig Jalan Provinsi	4 Tlok	Mempung

Tabel 3.30 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.705.501.005	40.576.549.699	95,01
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	235.000.000	225.658.124	96,02
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70.000.000	65.370.644	93,39
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30.000.000	28.250.650	94,17
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	29.819.300	99,40
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	15.000.000	14.147.000	94,31
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	30.000.000	29.816.600	99,39
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000	29.152.200	97,17
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	29.101.730	97,01
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.064.268.080	18.992.683.531	94,66
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.720.045.727	18.651.914.531	94,58
9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	299.222.353	296.290.000	99,02
10	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	30.000.000	29.535.000	98,46
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	14.940.000	99,60
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.500.000	103.400.000	68,70
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	65.500.000	18.820.000	28,73
13	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	85.000.000	84.580.000	99,51
iv	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	939.000.000	872.305.127	92,90
14	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	600.000.000	593.460.000	98,91
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150.000.000	101.086.500	67,39
16	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	139.000.000	133.246.500	95,86

17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000	44.512.127	89,02
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.873.704.294	1.822.648.470	97,28
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.900.000	99,67
19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	514.585.000	513.530.000	99,79
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	29.986.500	99,96
21	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	103.502.827	103.499.100	100,00
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000	10.080.000	50,40
23	Penyediaan Bahan/Material	182.442.750	182.399.050	99,98
24	Fasilitas Kunjungan Tamu	100.000.000	62.652.000	62,65
25	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873.173.717	870.732.820	99,72
26	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	20.000.000	19.869.000	99,35
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.715.240.000	7.402.674.352	95,95
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	1.750.000	35,00
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	860.697.000	744.188.352	86,46
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.849.543.000	6.656.736.000	97,19
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.727.788.631	11.157.180.095	95,13
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	190.500.000	141.708.356	74,39
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	584.500.000	514.719.215	88,06
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	301.565.331	300.003.331	99,48
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.501.223.300	10.051.219.193	95,71
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	149.530.000	99,69

viii	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		0	
35	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			0,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		3.776.848.190	3.541.655.147	93,77
i	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.538.848.190	1.498.345.790	97,37
36	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.538.848.190	1.498.345.790	97,37
ii	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	556.000.000	547.709.200	98,51
37	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	300.000.000	297.610.700	99,20
38	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	256.000.000	250.098.500	97,69
iii	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	882.000.000	836.036.581	94,79
39	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	252.000.000	249.000.000	98,81
40	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	550.000.000	547.435.211	99,53
41	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	80.000.000	39.601.370	49,50
iv	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi		0	
42	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			0,00
v	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	375.000.000	320.044.603	85,35
43	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	100.000.000	65.981.400	65,98
44	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	165.000.000	164.866.063	99,92
45	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi			0,00
46	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan umum	110.000.000	89.197.140	81,09

vi	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	195.000.000	147.162.926	75,47
47	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	160.020.000	117.256.700	73,28
48	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	34.980.000	29.906.226	85,50
vii	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	230.000.000	192.356.047	83,63
49	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	130.000.000	115.975.170	89,21
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	100.000.000	76.380.877	76,38
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		2.821.742.200	2.568.666.813	91,03
i	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	262.704.300	257.454.890	98,00
51	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	262.704.300	257.454.890	98,00
ii	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DUKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		0	
52	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DUKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			0,00

iii	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	1.229.912.900	993.218.772	80,76
53	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	430.470.000	215.366.802	50,03
54	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	799.442.900	777.851.970	97,30
iv	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.179.125.000	1.169.482.369	99,18
55	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	775.183.500	773.501.821	99,78
56	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	403.941.500	395.980.548	98,03
v	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	150.000.000	148.510.782	99,01
57	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	150.000.000	148.510.782	99,01
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		223.197.173	198.370.560	88,88
i	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	80.000.000	70.561.000	88,20
58	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	80.000.000	70.561.000	88,20
ii	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	80.000.000	72.053.913	90,07
59	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	80.000.000	72.053.913	90,07

iii	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	63.197.173	55.755.647	88,22
60	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Merjadi Kevenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	63.197.173	55.755.647	88,22

Dari hasil analisa terhadap kegiatan terkait dengan pencapaian target kinerja dapat disimpulkan bahwa penyebab keberhasilan pencapaian kinerja di beberapa kegiatan dikarenakan hal – hal sebagai berikut:

- Adanya Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program / kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
- Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.

Sementara penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pada beberapa kegiatan disebabkan antara lain:

- Kurang tepatnya dalam menetapkan target kinerja, karena belum jelas antara output dan outcome yang ingin dicapai
- Kurangnya evaluasi terhadap target dan besaran target berdasarkan data series 5 tahun kebelakang.

Solusi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja terkait dengan hambatan yang ada di dalam proses pelaksanaan kegiatan:

- Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
- Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan secara berkala

3.3.6 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah termasuk Prestasi Kerja yang dicapai atas Penggunaan Anggaran. Prestasi Kerja yang dimaksud disini adalah kinerja yang didefinisikan sebagai keluaran / hasil dari kegiatan / Program yang hendak dicapai sehubungan dengan Penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk pencapaian kinerja terbaik tentunya memerlukan analisa yang tepat, menyangkut Sumber Daya yang ada, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia.
- b. Sumber Dana / Anggaran.

Analisis dari efisiensi sumber daya dari kondisi yang ada saat ini di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan :

- a. Sumber Daya Manusia.

- 1) Dalam hal pengelolaan SDM, harus mendapat perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Sehingga pendistribusian pegawai sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang-bidang yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja.
- 2) Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
- 3) Masih kurangnya tenaga yang kompeten harus diminimalisir dengan mempertanyak kuantitas (volume) diklat – diklat teknis yang berkesesuaian dengan kebutuhan kerja.
- 4) Terkait kebutuhan tenaga teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia – STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat). Dimana dari tahun 2023 telah dilakukan Penerimaan ASN sebanyak 37 Orang dan sudah bertambahnya pegawai teknis di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dari lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Indonesia – STTD.

- b. Sumber Dana / Anggaran Efisiensi terhadap penggunaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target kinerja. Karena dalam Target Kinerja SKPD, yang diukur tidak hanya pencapaian fisik dari kegiatan, tetapi juga realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Karena hal ini memperlihatkan sesuai atau tidaknya proses perencanaan dengan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan. Untuk mendukung urusan wajib Perhubungan Tahun 2024 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Selatan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.49.527.288.568, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.47.055.379.878, dan Belanja Modal Rp.2.471.908.690. Untuk realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.44.463.064.069 / (94,49%) dan realisasi anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 2.422.178.150 / (97,99 %).

Tabel 3.31 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja		Anggaran		Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	Memperkuat Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	0,69	0,629	Rp 2.453.271.090	Rp 2.345.795.356	4,4%
2		2. Jumlah Perbaikan Lelet Pengangkutan Regional	2	1	Rp 430.470.000	Rp 215.366.802	50,0%
		3. Jumlah Terminal Type B	7	7	Rp 721.000.000	Rp 712.575.263	1,2%
		4. Indeks Kepuasan Masyarakat (DKS)	69,1	86,09	Rp 42.705.501.005	Rp 40.576.949.699	5,0%
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	57,8	75	Rp 210.000.000	Rp 155.178.540	26,1%
		6. Load faktor penumpang kereta api	80	75	Rp 160.000.000	Rp 142.614.913	10,9%
		7. Load faktor penumpang kapal laut	9	20	Rp 1.441.829.309	Rp 1.426.917.299	1,0%
3	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	8. Load faktor penumpang Bus AKDP	70	64	Rp 390.020.000	Rp 309.612.747	20,6%
		9. Load faktor angkutan barang darat	69	63	Rp 550.000.000	Rp 547.435.211	0,5%
		10. Load faktor angkutan barang laut	55	62,35	Rp 190.000.000	Rp 148.510.782	1,0%
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	54	94,62	Rp 63.197.173	Rp 55.755.647	11,8%
4	Memurnikan Keperluan Arus Lalu Lintas	12. V/C Kriteria Jalan Provinsi	0,302	0,39	Rp 252.000.000	Rp 249.000.000	1,2%

3.3.7 Analisis Program/Kegiatan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.32 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja				Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN URSAN REHABILITASI DAN DAERAH INOVASI	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen 2 Laporan	5 Dokumen 2 Laporan	100,00	335.000.000	328.658.124	98,02
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Keuangan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	30.064.268.080	18.992.623.531	94,64
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Barang Milik Daerah	1 Dokumen 1 Laporan	1 Dokumen 1 Laporan	100,00	158.900.000	163.460.000	68,70
		4. Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Program Dilat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	215 Orang	215 Orang	100,00	938.000.000	872.365.127	92,90
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum PD	2 Dokumen 2 Laporan	2 Unit dan 6 Unit B2	100,00	1.879.794.294	1.822.648.470	97,28
		6. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3 Laporan	3 Laporan	100,00	7.715.240.000	7.402.674.352	95,95
		7. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah BMD yang terdapat	460 Unit	460 Unit	100,00	11.777.788.631	11.157.180.095	95,13
2	PROGRAM PENYELANGKARAN LALU LINTAS DAN AKUTITAS JALAN (SLAT)	8. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Jalan di Jalan Provinsi yang terdapat	2 Unit	2 Unit	100,00	1.538.848.190	1.488.348.790	97,37
		9. Penyelenggaraan Penyelenggaraan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Terminal Tipe B yang dimiliki	6 Unit	6 Unit	100,00	536.000.000	547.765.200	98,51

3	PROGRAM PENGELOMAN PELAYARAN	10	Penelitian Manajemen dan Kebijakan Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Titik Pelaksanaan Pengamatan dan Rikayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	4 Titik	4 Titik	100,00	882.000.000	836.036.381	34,79	5,3%
		11	Audit dan Inspeksi Kenderaan (LAJ) di Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Kenderaan LAJ	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	375.000.000	320.044.603	85,36	14,7%
		12	Penyediaan Angkutan Umum untuk Zona Angkutan Orang disekitar Barong Arca Roca dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	195.000.000	147.102.925	75,47	24,5%
		13	Peningkatan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Lini Trayek yang dikembangkan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	230.300.000	193.256.047	83,63	16,4%
		14	Penerbitan Lini Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan	Jumlah Lini Trayek Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	262.704.300	227.494.899	98,00	2,0%
		15	Pembangunan, Peningkatan, Peningkatan dan Pengembangan Fasilitas Pengiriman Regional	Jumlah Pembangunan Pengiriman Regional yang dibangun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1.229.912.900	963.218.772	80,76	19,2%
3	PROGRAM PENGELOMAN PELAYARAN	16	Penerbitan Lini Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembangunan Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1.179.125.000	1.105.482.369	99,18	0,8%

		17	Penerbitan Lembaran Undang-Undang Badan Usaha Perikanan di Kabupaten Pangkep	Jumlah Lembaran untuk Badan Usaha Perikanan	1 Dokumen 2 Laporan	100,00	150.000.000	148.510.762	99,01	1,2%
		18	Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep tentang Penyelenggaraan Perikanan	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	1 Dokumen	100,00	80.000.000	70.561.000	88,20	11,8%
		19	Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep tentang Penyelenggaraan Perikanan	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah	1 Dokumen	100,00	80.000.000	72.053.513	90,07	9,9%
4	PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN	20	Penerbitan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkep tentang Penyelenggaraan Perikanan	Jumlah dokumen (tanpa koreksi)	1 Dokumen	100,00	63.197.173	55.795.647	88,22	11,8%

3.4 REALISASI ANGGARAN

Dari Pagu Anggaran yang tersedia, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 4 (empat) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan yang Total Pagu Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 setelah perubahan sebesar Rp. 49.527.288.568,- (Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dengan rincian :
 - o Belanja Pegawai dengan Pagu Dana sebesar Rp.20.074.768.080,-, terealisasi sebesar Rp. 18.959.614.531,- dengan persentase 94,44 %.
 - o Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 26.980.611.796,-, terealisasi sebesar Rp. 25.503.449.538,- dengan persentase 94,53 %.
- Belanja Modal sebesar Rp. 2.471.908.690,-, terealisasi sebesar Rp. 2.422.178.150,- dengan persentase 97,99 %.

Realisasi Anggaran Total Belanja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 46.885.242.219,- atau 94,67 % dengan realisasi fisik sebesar 100% adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 42.705.501,005,- terealisasi sebesar Rp. 40.576.549.699,- dengan persentase sebesar 95,01%, dan sisa anggaran sebesar Rp.2.128.951.306,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 235.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 225.658.124,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,02% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp.20.064.266.080,- terealisasi sebesar Rp.18.992.683,531 ,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,66% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah selama 12 bulan,
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 150.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 103.400.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 68,70% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 939.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 872.305.127,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 92,90% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.873.704,294,- terealisasi sebesar Rp. 1.822.648,470,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,28% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp. 7.715.240,000,- terealisasi sebesar Rp. 7.402.674,352,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,95% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan pagu dana sebesar Rp.11.727.788,631,- terealisasi sebesar Rp.11.157.180,095,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 95,13% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.776.848.190,- terealisasi sebesar Rp. 3.541.655.147,- dengan persentase sebesar 93,77%, dan sisa anggaran sebesar Rp. 235.193.043,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp.1.538.848.190,- terealisasi sebesar Rp. 1.498.345.790,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,37% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B, dengan pagu dana sebesar Rp. 556.000.000,- terealisasi sebesar Rp.547.709.200,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,51% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B.
3. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 882.000.000,- terealisasi sebesar Rp.836.036.581,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 94,79% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi.
4. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 375.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 320.044.603,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 85,35% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Provinsi.
5. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 195.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 147.162.926,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 75,47% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan

Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 230.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 192.356.047,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 83,63% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

III. Program Pengelolaan Pelayaran

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.821.742.200,- terealisasi sebesar Rp. 2.568.666.813,- dengan persentase sebesar 91,03%, dan sisa anggaran sebesar Rp.253.075.387,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan dengan pagu dana sebesar Rp. 262.704.300,- terealisasi sebesar Rp. 257.454.890,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 98,00% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan .
2. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan pagu dana sebesar Rp.1.229.912.900,- terealisasi sebesar Rp. 993.218.772,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 80,76% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.
3. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1

(satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 1.179.125.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.169.482.369,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,18% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

4. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional, dengan pagu dana sebesar Rp. 150.000.000,- terealisasi sebesar Rp.148.510.782,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 99,01% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional.

IV. Program Pengelolaan Perkeretaapian

Dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 222.197.173,00,- terealisasi sebesar Rp.198.370.560,- dengan persentase sebesar 88,88 %, dan sisa anggaran sebesar Rp.23.826.613,-. Adapun program ini, terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 70.561.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 88,20% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
2. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp. 80.000.000,- terealisasi sebesar Rp.72.053.9163,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 90,07% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi.

3. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan pagu dana sebesar Rp.63.197.173,- terealisasi sebesar Rp.55.755.647,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 88,22% dan Realisasi fisik 100%. Hasil yang dicapai adalah terlaksananya Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringanya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Jumlah Anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2024 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut:

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1. Meningkatkan Konektivitas Transportasi	1. Program Penunjang Usaha Pemerintahan daerah Provinsi	42.705.501.005	40.576.349.699	95,01
2. Meningkatkan simpul transportasi	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.776.848.190	3.541.655.147	93,77
3. Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	3. Program Pengelolaan Pelayaran	2.821.742.200	2.568.666.813	91,03
4. Menurunkan kemacetan arus lalu lintas	4. Program Pengelolaan Perkeretaapian	223.197.173	198.370.560	88,88
TOTAL		49.527.288.568	46.885.242.219	94,67

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024**

**BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2024, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dapat dikategorikan sangat Baik dengan nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu 115 %. Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi fisiknya mencapai 100 % dan akuntabilitas keuangan mencapai 94,67%, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan - penyempurnaan Kinerja Dinas Perhubungan, khususnya Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

4.2 SARAN

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) / Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga kedisiplinan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.
4. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur untuk menunjang pencapaian target kinerja dinas secara maksimal.

Penyusunan LAKIP 2024 masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi komitmen bersama, untuk perbaikan dan penyempurnaan LAKIP:

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (input, output, outcome) yang terukur.
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data Indikator Kinerja Utama.
3. Indikator Kinerja Utama betul – betul diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja input, output dan outcome.

Palembang, 23 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINASRA JS
Pembina Utama Muda (IV/d)
NIP. 19740603 199101 1 002



Copyright 2025, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Kapten A. Rival No. 51 Palembang